

Kode>Nama Rumpun Ilmu: 601/Ilmu
Sosial dan Politik
Tema: Integrasi Bangsa dan Harmoni Sosial
(*Nation Integration and Social Harmony*)

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL**

JUDUL PENELITIAN:

MODEL PENGEMBANGAN MULTIKULTURALISME DIGITAL
(Intervensi Daring Berbasis Pendidikan Kewarganegaraan untuk Penguatan
Koeksistensi Damai di Indonesia)

Peneliti Utama:

Dr. Suharno, M.Si. NIDN. 0017046807

Anggota Peneliti:

Dr. Samsuri, M.Ag. NIDN. 0019067206

Halili, S.Pd., M.A. NIDN. 0014057804



Dibiayai oleh :
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, melalui DIPA Universitas
Negeri Yogyakarta tahun 2019, dan berdasarkan Surat Perjanjian Internal
Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional, Nomor .../Stranas-
Multitahun/UN .../2019

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Oktober 2019

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : MODEL PENGEMBANGAN MULTIKULTURALISME
DIGITAL (Intervensi Daring Berbasis Pendidikan
Kewarganegaraan untuk Penguatan Koeksistensi Damai di
Indonesia)

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Dr SUHARNO, S.Pd, M.Si
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta
NIDN : 0017046807
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Nomor HP : 081313949490
Alamat surel (e-mail) : suharno@uny.ac.id

Anggota (1)

Nama Lengkap : Dr SAMSURI S.Pd, M.Ag
NIDN : 0019067206
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta

Anggota (2)

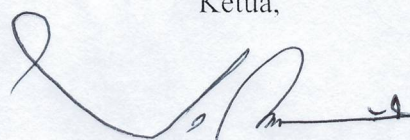
Nama Lengkap : HALILI S.Pd, M.A
NIDN : 0014057804
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra : MGMP PPKn SMA/MA Kabupaten Bantul DI
Yogyakarta
Alamat : MAN Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kabupaten
Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Penanggung Jawab : Widi Hastuti, M.Pd.
Tahun Pelaksanaan : **Tahun Ke 2 dari rencana 2 tahun**
Biaya Tahun Berjalan : **Rp 187,135,000**
Biaya Keseluruhan : Rp 309,200,000

Kota Yogyakarta, 31 - 10 - 2019

Ketua,



(Dr SUHARNO, S.Pd, M.Si)
NIP/NIK 196804172000031001

Mengetahui,
Dekan FIS UNY



(Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.)
NIP/NIK 196203211989031001

Menyetujui,
Ketua LPPM UNY



(Dr. Suyanta, M.Si.)
NIP/NIK 196605081992031002

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN Pengesahan	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian	3
C. Urgensi Penelitian	4
D. Manfaat dan Luaran Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	3
A. Multikulturalisme dan Perkembangan Teknologi Online	8
B. Pendidikan Multikultural dan Pendidikan Kewarganegaraan	11
BAB 3. METODE PENELITIAN	16
A. Setting Waktu dan Lokasi Penelitian	16
B. Desain Penelitian.....	16
C. Sumber Data dan Subjek Penelitian	16
D. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data	17
E. Pengujian Keabsahan Data.....	18
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	19
A. Prakarsa Guru dalam Mengembangkan Multikulturalisme Digital ...	19
B. Kebutuhan Pengembangan Multikulturalisme Digital.....	24
C. Aplikasi Multikulturalisme Digital	27
BAB 5. SIMPULAN DAN SARAN	35
A. Simpulan	35
B. Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA	38
Lampiran	40

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk: 1) Mengidentifikasi inisiatif yang dilakukan oleh guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk memperkuat multikulturalisme dan koeksistensi damai melalui dunia maya, 2) Mengembangkan multikulturalisme digital sebagai intervensi daring untuk memperkuat koeksistensi damai, dan 3) Mengembangkan rancangan kebijakan dalam mendorong penguatan peran guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk menguatkan koeksistensi damai dalam kebhinnekaan Indonesia. Penelitian tahun pertama ini berfokus untuk mencapai tujuan yang pertama.

Penelitian ini merupakan *research and development* (R&D). Metode utama yang digunakan: wawancara mendalam, observasi, studi literatur, *peer discussion* (PD), dan *focus group discussion* (FGD). Wawancara mendalam, observasi dan studi literatur digunakan untuk mengidentifikasi inisiatif yang dilakukan oleh guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk memperkuat multikulturalisme dan koeksistensi damai melalui dunia maya. Sedangkan PD dan FGD digunakan untuk mengembangkan multikulturalisme digital sebagai intervensi daring untuk memperkuat koeksistensi damai dan mengembangkan rancangan kebijakan dalam mendorong penguatan peran guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk menguatkan koeksistensi damai dalam kebhinnekaan Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengalaman Indonesia, Pendidikan Multikultural di persekolahan dikembangkan tidak dalam bentuk mata pelajaran yang berdiri sendiri, namun dalam bentuk subjek terintegrasi pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, multikulturalisme digital juga dikembangkan melalui kegiatan informal dalam bentuk praktek pembelajaran tersendiri yang tidak diintegrasikan ke dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. mengingat dalam sistem pendidikan di Indonesia tidak ada program formal yang bersifat kurikuler dan non kurikuler mengenai pendidikan multikultural, apalagi yang bersifat digital, maka pengembangan multikulturalisme digital sangat bergantung kepada inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh para guru pendidikan kewarganegaraan. Beberapa inisiatif awal multikulturalisme digital sudah dilakukan oleh guru-guru pendidikan kewarganegaraan, antara lain dalam beberapa bentuk: a) pengembangan e-learning pendidikan kewarganegaraan, .b) dalam bentuk website dan blog pribadi, dan c) dalam bentuk media sosial.

Kata Kunci: *Multikulturalisme digital, pendidikan multikultural, pendidikan kewarganegaraan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Multikulturalisme atau kebhinnekaan di Indonesia merupakan fakta yang yang tidak dapat dipungkiri (*irrevocable*), bahkan secara teoretik. Begitu banyak ilmuwan yang mengapresiasi fenomena objektif tersebut, seperti Tim Lindsey dan Helen Pausacker (2016) yang menyebut Indonesia sebagai *a plural, diverse and multicultural nation*.

Selain itu, multikulturalisme merupakan salah satu nilai dasar pembentuk (*building fundamental values*) negara-bangsa. Hal itu tidak saja mewujud dalam keyakinan filosofis-konseptual namun juga menjadi mufakat politik formal negara bangsa melalui pencantuman “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai sesanti formal yang tertulis dalam lambang negara Garuda Pancasila.

Cita pendiri negara tentang kemampuan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan (*peaceful coexistence* atau koeksistensi damai—istilah yang secara baku digunakan dalam penelitian ini) adalah syarat dasar untuk mewujudkan dan merawat multikulturalisme. Dalam konteks mendeskripsikan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, Sukarno menyatakan: “...Yah sudahlah, kalau sudah terlanjur menjadi blok-blok, sini satu blok, situ satu blok. Tapi dua blok ini bisa hidup berdamping-dampingan satu sama lain. Dalam bahasa Inggrisnya: *coexistence*, malahan dikatakan *peaceful coexistence*. Hidup berdamping-dampingan satu sama lain dalam suasana perdamaian. *Peaceful coexistence*. Dan ini ternyata bisa, mungkin, bukan saja mungkin, bisa.” (Alam [ed], 2000: 76-78)

Namun, dalam observasi pra penelitian ditemukan gejala bahwa hari-hari ini dunia maya telah banyak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok intoleran untuk menciptakan ketegangan ideologis antar identitas kultural yang berbeda terutama berdasarkan agama dan identitas sosiokultural lainnya dalam bentuk wacana, propanda, ujaran kebencian (*hate speech*) dan sebagainya.

Fenomena tersebut harus mendapat perhatian dan penanganan memadai mengingat begitu banyak pengalaman traumatik Indonesia berkenaan dengan konflik multikultural, konflik antar etnik dan sejenisnya. Antara 1952 hingga 2000, misalnya, konflik di Kalimantan Barat antar berbagai etnis paling tidak telah terjadi 12 kali. Konflik-konflik tersebut antara lain: pertikaian antara etnis Madura dan etnis Dayak di tahun 1952, peristiwa pengusiran orang-orang yang berlatar belakang etnis Cina oleh orang Dayak di tahun 1967, peristiwa kerusuhan antara etnis Madura dengan etnis Dayak tahun 1979 yang terjadi di Kalimantan, peristiwa pertikaian antara etnis Madura dan etnis Dayak yang terjadi di tahun 1983, peristiwa kerusuhan etnis Dayak dengan etnis Madura yang terjadi di Sanggau Ledo di tahun 1997, konflik antara etnis Madura dengan etnis Dayak yang terjadi di Kalimantan pada tahun 1998, konflik antara etnis Melayu dengan etnis Madura yang terjadi di Sambas, dan kerusuhan etnis Melayu Pontianak dengan etnis Madura yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2000. Peristiwa konflik multikultur juga terjadi di Sampit Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah yang melibatkan warga etnis Madura dan etnis Dayak. Dalam konflik ini ratusan bahkan ribuan penduduk dinyatakan tewas, kebanyakan warga Madura. Konflik juga mengakibatkan arus pengungsian sekitar 55.323 jiwa yang menimbulkan penelantaran, terbukti dengan

meninggalnya 357 pengungsi, meluasnya wabah penyakit, kualitas hidup yang buruk serta sanitasi yang tidak memadai. Dampak luas yang terjadi berupa suasana ketakutan, trauma psikologis, dan ribuan warga yang kehilangan harta (Suharno, 2010: 2).

Oleh karena itu, pengembangan multikulturalisme digital mendesak untuk dilakukan terutama melalui agen-agen pendidikan multikultural dalam jenjang pendidikan formal, yaitu guru Pendidikan Kewarganegaraan. Di satu sisi, perkembangan dunia digital memungkinkan pertukaran wacana terjadi begitu cepat dan tak terbandung. Diperlukan intervensi untuk membangun semacam “kontra propaganda” atas ketegangan antar identitas kultural yang sengaja dipicu oleh kelompok-kelompok tertentu melalui dunia maya. Di sisi lain, optimalisasi peran guru Pendidikan Kewarganegaraan sangat relevan mengingat Pendidikan Kewarganegaraan antara lain memikul mandat pendidikan multikultural paling tidak dalam bentuk *content integration* yang diintroduksi oleh James Banks (1990: 3). Selain itu, kapasitas mereka pada aspek pengetahuan (*civic knowledge*), watak (*civic disposition*) dan keterampilan (*civic skills*) secara umum sudah memadai.

B. Tujuan

Penelitian ini memiliki tiga tujuan khusus. *Pertama*, mengidentifikasi inisiatif yang dilakukan oleh guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk memperkuat multikulturalisme dan koeksistensi damai melalui dunia maya. *Kedua*, mengembangkan multikulturalisme digital sebagai intervensi daring untuk memperkuat koeksistensi damai. *Ketiga*, mengembangkan rancangan kebijakan

dalam mendorong penguatan peran guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk menguatkan koeksistensi damai dalam kebhinnekaan Indonesia.

C. Urgensi Penelitian

Penelitian ini urgen untuk dilakukan. Urgensi tersebut terletak dalam dua konteks. Yang pertama adalah konteks makro dimana multikulturalisme atau kebhinnekaan merupakan realitas faktual-objektif yang tidak bisa dibantah, sekaligus juga merupakan landasan filosofis bangsa dan negara yang telah menjadi mufakat politik para pendiri negara (*founding fathers and mothers*) sebagaimana tertuang dalam sesanti “Bhinneka Tunggal Ika”. Namun dalam realitas kontemporer, masih sangat mudah untuk menemukan fenomena bahwa multikulturalisme Indonesia tersebut kerap kali didelegitimasi dengan sosialisasi masif anti sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Bahkan, tidak sulit untuk menemukan organisasi dan gerakan yang memiliki visi untuk mewujudkan ideologi negara, misalnya berdasarkan agama tertentu, yang menafikan multikulturalisme atau kebhinnekaan tersebut.

Selain konteks makro tersebut, penelitian ini juga dapat ditemukan urgensinya dalam konteks mikro dimana dunia maya atau dunia virtual atau teknologi internet atau media online kerap dijadikan sebagai alat untuk menyosialisasikan dan mempropagandakan ketegangan (*tension*) antar identitas kultural yang dapat memicu konflik multikultural secara horizontal. Perbedaan antar identitas pembentuk bangsa dan negara bukannya dijadikan modal perekat untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*), namun

dipertentangkan untuk saling menegaskan identitas yang berbeda. Hal ini tentu merupakan ancaman serius yang harus diantisipasi mengingat Indonesia memiliki begitu banyak pengalaman buruk akibat konflik multikultural dalam bentuk konflik antar agama dan/atau konflik antar etnik, seperti Konflik Sambas, Konflik Sampit, dan Konflik Poso.

Oleh karena itu, diperlukan langkah sistemik untuk mencegah fenomena delegitimasi dan destruksi multikulturalisme atau kebhinnekaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pengembangan multikulturalisme digital yang diinisiasi dengan memperkuat peran guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun koeksistensi damai melalui media daring (*online*), seperti media sosial, blog dan situs internet/website.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini urgen untuk diselenggarakan. Di satu sisi dalam bentuk identifikasi inisiatif-inisiatif awal yang sudah dilakukan oleh guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam memperkuat koeksistensi damai dalam bentuk diseminasi dan dialektika wacana, perluasan dan pendalaman wawasan serta berbagi pengalaman antar identitas kultural yang berbeda. Di sisi lain, dalam bentuk pengembangan multikulturalisme digital sebagai intervensi berbasis daring untuk memperkuat koeksistensi damai dalam rangka multikulturalisme atau kebhinnekaan Indonesia melalui penguatan peran serta guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah-sekolah menengah atas.

D. Manfaat dan Luaran Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua: Manfaat teoretis

dan manfaat praktis. Manfaat teoretis penelitian dapat diuraikan sebagaimana berikut: 1) Memperkuat khazanah literer tentang penguatan multikulturalisme di era media baru (*new media*) melalui peran kontra wacana (*counter discourse*) dengan cara optimalisasi peran-peran agen pendidikan, khususnya guru Pendidikan Kewarganegaraan. 2) Melalui hasil penelitian ini dapat diteorisasi prinsip-prinsip multikulturalisme digital yang diintegrasikan dalam kerja fungsional guru-guru, khususnya guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan.

Manfaat praktis penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Menghasilkan rumusan hasil analisis dan eksplorasi mengenai prinsip-prinsip multikulturalisme digital yang dikembangkan melalui inisiatif-inisiatif para guru dalam menguatkan koeksistensi damai, yang kemudian dapat dirumuskan dalam bentuk rancangan kebijakan mengenai intervensi daring untuk menguatkan koeksistensi damai melalui optimalisasi peran guru Pendidikan Kewarganegaraan. 2) Juga menghasilkan luaran berupa artikel, buku, dan modul yang berisi inisiasi pendidikan multikultural oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam kecanggihan perkembangan multikultural dan memberikan *new insight* mengenai multikulturalisme digital, sebagaimana dalam tabel berikut.

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian	
			TS	TS+1
1	Rekayasa Sosial		-	-
2	Publikasi Ilmiah	Internasional	-	<i>Submitted</i>
		Nasional terakreditasi	-	-
3	Pemakalah dalam temu ilmiah	Internasional	<i>Draft</i>	Dilaksanakan
		Nasional	-	-
4	Buku ajar (ISBN)		-	<i>Final draft</i>
5	Teknologi tepat guna		<i>Draft</i>	Produk
6	Visiting lecturer internasional		-	-

7	Strategi	<i>Draft</i>	Dilaksanakan
8	Hak cipta	-	<i>Granted</i>
9	Tingkat Kesiapan Teknologi	Skala 4	Skala 5

BAB II

KAJIAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Multikulturalisme dan Perkembangan Teknologi Online

Multikulturalisme, dengan keragaman dan kecenderungan perkembangan konsep dan praktek, oleh Parekh (1997: 88) dibedakan menjadi lima macam. *Pertama*, isolasionis, yang mengacu kepada masyarakat yang berbagai kelompok kultural yang ada di dalamnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal antara yang satu dengan yang lainnya.

Kedua, akomodatif, yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. *Ketiga*, otonomis, yaitu masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima.

Keempat, kritis atau interaktif yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu concern dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. *Kelima*, kosmopolitan, masyarakat ini berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat dimana setiap individu tidak lagi terikat dan *committed* kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

Dalam penggunaannya, istilah multikulturalisme sering dipertukarkan dengan pluralisme. Untuk mengkaji lebih jernih multikulturalisme, perlu dicermati pemetaan yang dikemukakan oleh Bhikku Parekh atas masyarakat multikultural (Parekh, 2000, Salim dan Suhadi, 2000: 106-108). *Pertama*, adalah kelompok masyarakat yang memiliki budaya sebagaimana umumnya masyarakat, namun dalam beberapa hal mereka memiliki keyakinan dan praktek keyakinan yang berbeda sesuai dengan wilayah kehidupan dan cara hidup yang berlainan. Mereka tidak berkeinginan untuk melahirkan budaya alternatif, akan tetapi menganekaragamkannya dengan kehadiran mereka yang berbeda tersebut. Parekh menyebut kelompok ini sebagai keberagaman subkultur (*subculture diversity*).

Kedua, kelompok masyarakat yang di dalamnya ada kalangan yang kritis terhadap berbagai nilai dan prinsip utama yang ada dalam budaya dominan masyarakat tersebut, untuk kemudian berupaya mengkonstruksinya kembali. Parekh menyebut fenomena ini sebagai keanekaragaman pandangan (*perspectival diversity*).

Ketiga, kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran diri yang berbeda, terorganisir dengan baik, dan mereka memiliki hidup dengan sistem keyakinan dan praktek keyakinan yang berlainan. Gejala ini disebut keanekaragaman komunal (*communal diversity*).

Jadi, masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang komponennya menggambarkan salah satu, dua, atau ketiga klasifikasi tersebut. Berbeda dengan pluralisme yang ruang lingkungannya pada sub komponen yang besar-besar seperti

agama, suku, dan ras, multikulturalisme mencakup komponen yang lebih “mikro” lagi, seperti bahkan pemikiran dan gaya hidup.

Sebagai benang merah dari paparan tersebut, multikulturalisme merupakan konsep pengelolaan masyarakat yang secara kultural majemuk, sekecil apapun tingkat dan lingkup kemajemukan budaya tersebut, dengan memberikan pengakuan (rekognisi) atas eksistensi komponen kemajemukan tersebut. Pengakuan tersebut dalam fenomena kontemporer merupakan tuntutan (*demand*). Oleh karenanya ketiadaan pengakuan, yang berarti nihilnya pemenuhan tuntutan, sangat potensial terhadap munculnya berbagai konflik.

Pengelolaan multikulturalisme jelas merupakan sebuah kerumitan tersendiri yang tidak mungkin dipangku oleh satu pihak saja, misal pemerintahan Negara. Kerumitan tersebut meningkat di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT), khususnya internet yang menyajikan dunia virtual, dunia yang mempunyai esensi tapi tidak dalam bentuk. Di ruang virtual setiap orang bebas mengisi identitas tanpa ada aturan hukum yang mengikat, dengan mengaku menjadi siapapun dan dimanapun. Jika mau siapapun bisa memalsu identitas (Nia Aprianingsih, dalam Nur Janti, dkk, 2014: 6-7). Situasi tersebut membuat kelompok-kelompok monokulturalis atau antipluralis dengan mudah memancing ketegangan dan memicu konflik dengan mempertentangkan perbedaan antar identitas kultural yang sejatinya bisa hidup berdampingan (koeksistensi) secara damai.

Dalam konteks itu multikulturalisme digital dapat menjadi salah satu alternatif terobosan untuk mengatasi persoalan, dengan program utama berupa

penyediaan *online discussion boards* (Koen Leurs, Eva Midden dan Sandra Ponzanesi, 2012: 150-175). Fitur-fitur daring tersebut dapat diperluas dengan tekanan pada pengakuan dan penghargaan atas perbedaan (*difference*) bukan hanya atas kebudayaan (*culture*) dalam perspektif multikulturalisme (Modood, 2007).

B. Pendidikan Multikultural dan Pendidikan Kewarganegaraan

Salah satu terobosan yang dapat dioptimalkan dalam rangka mengantisipasi dampak negatif dunia maya yang dapat mendistorsi pemaknaan atas multikulturalisme, merusak dan bahkan menghancurkan kebhinnekaan Indonesia adalah penguatan (*fostering*) pendidikan multikultural, termasuk melalui pemanfaatan dunia maya. Meminjam perspektif James Banks (1990), terdapat beberapa dimensi yang saling berkaitan satu sama lain. Beberapa dimensi tersebut adalah: Pertama, *content Integration*. Dimensi ini mengidealkan pendidikan multikultural sebagai ruang yang mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu.

Kedua, *the knowledge construction process*. Dimensi pendidikan multikultural membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Ketiga, *an equity paedagogy*. Dimensi ini menghendaki metode pengajaran yang menyesuaikan dengan cara belajar pembelajar (*learners*) yang beragam sesuai dengan latar belakang masing-masing, baik dari segi ras, budaya (*culture*) ataupun sosial. Keempat, *prejudice reduction*. Pendidikan multikultural memiliki dimensi untuk mengurangi prasangka atau prejudis tentang sebuah

identitas kultural.

Pendidikan multikultural demikian dapat diintegrasikan dalam pendidikan kewarganegaraan atau dalam cara pandang yang lebih luas lagi pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah pendidikan multikultural. Seperti yang dinyatakan oleh Cogan (1999), *citizenship education* pada dasarnya adalah wahana pendidikan yang didesain untuk membina dan mengembangkan warganegara yang cerdas dan baik dalam latar subsistem pendidikan formal, non formal dan informal. Jadi warga negara baik dan cerdas yang akan dibentuk melalui pendidikan kewarganegaraan meliputi *coverage* pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan formal lain, keluarga dan juga masyarakat. Jika ditarik dalam kerangka objektif masyarakat yang beranekaragam, pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya bertujuan untuk membangun kewarganegaraan atau keberadaban warga negara (*civilized citizen*) di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang beraneka ragam (multikultural).

Dengan demikian, mengaitkan pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan multikultural tidak saja relevan secara konseptual, namun lebih dari itu mendapatkan kemendesakan jika dikaitkan dengan fenomena aktual tantangan keberagaman dan kebhinnekaan di tengah arus deras perkembangan teknologi internet.

C. Penelitian Terdahulu dan Peta Jalan Penelitian

Penelitian ini dapat ditempatkan sebagai bagian dari penelitian-penelitian lain sebelumnya. Sehingga ke depan dapat dikonstruksi arah futuristik yang lebih

sistematis. Beberapa penelitian sebelumnya yang dapat disajikan dalam *roadmap* ini antara lain:

- 1) *Politik Rekognisi dalam Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Konflik di dalam Masyarakat Multikultural* (2010). Dr. Suharno, M.Si. Dalam penelitian dalam rangka penyelesaian program doktor ini diungkapkan bagaimana peran negara (terutama pemerintah daerah) dalam menyelesaikan konflik dengan derajat kekerasan yang akut. Melihat kesimpulan penelitian ini, tampak betapa pentingnya posisi negara dalam menyelesaikan konflik, terutama dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia.
- 2) *Penuntasan Resolusi Konflik Multikultural Di Indonesia (Perbandingan Model Resolusi Konflik Sampit Kotawaringin Timur dengan Ambon Maluku)* (2012). Dr. Suharno, M.Si, Dr. Samsuri, M.Ag. dan Halili, S.Pd., M.A. Dalam penelitian yang didanai melalui Skim Penelitian Kelompok DIPA FIS UNY ini, tim peneliti menyajikan perbandingan resolusi konflik multikultural di dua setting lokasi, yaitu Sampit dan Ambon, dimana proses di Sampit berhasil lebih cepat dibandingkan di Ambon.
- 3) *Pengembangan Model Peace-Building Teaching and Learning: Intervensi Pencegahan Kekerasan Melalui Pendidikan Formal* (2012), Dr. Suharno, M.Si., Dr. Samsuri, M.Ag. dan Grendi Hendrastomo, S.Sos., M.A. Penelitian ini mengungkap fenomena umum kekerasan dalam pendidikan sebagai latar untuk mengusulkan inisiatif lanjutan berupa sistem pembelajaran yang dapat membangun kultur damai dan anti kekerasan di kalangan siswa berupa

Pengembangan Model Peace-Building Teaching and Learning. Pembelajaran ini didesain untuk mengambil setting lokasi di dalam dan/atau luar kelas.

4) *Pengembangan Model Resolusi Konflik untuk Masyarakat Multikultural (Studi Implementasi Kebijakan Resolusi Konflik Di Sampit, Poso dan Ambon)* (2013).

Dr. Suharno, M.Si., Dr. Samsuri, M.Ag. dan Iffah Nurhayati, S.H., M.Hum. Penelitian ini berusaha merumuskan model resolusi konflik untuk masyarakat multikultural berbasis pengalaman konflik dan resolusinya di tiga lokasi, yaitu Sampit, Ambon, dan Poso. Dua kata kunci utama yang ditekankan dalam model tersebut adalah politik rekognisi dan kebijakan *bottom-up*.

5) *Pembinaan Karakter Kewargaan Multikultural Berbasis Pilar-pilar Kebangsaan di Madrasah Aliyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta* (2015). Dr.

Samsuri, M.Ag. dan Dr. M. Murdiono, M.Pd. Penelitian ini menganalisis mengenai basis teoretik kewarganegaraan multikultural yang diinterpretasi dan diimplementasikan oleh madrasah-madrasah aliyah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dua konteks yang menarik yang coba diintegrasikan dalam satu kontinum oleh penelitian ini adalah kebangsaan dan keagamaan dalam perspektif kebangsaan dan kenegaraan.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti (pengaju proposal penelitian ini) dan rekan-rekan peneliti lainnya dapat diposisikan sebagai *preliminary research/knowledge* untuk melakukan penelitian ini. Berbagai penelitian tersebut dan penelitian ini merupakan bahan penting untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai tempat penyemaian kehidupan masyarakat masa depan

Indonesia yang mengarusutamakan (*mainstreaming*) dan menguatkan (*fostering*) koeksistensi damai dalam kerangka multikulturalisme atau kebhinnekaan.

Setelah penelitian ini selesai, dapat disistematisasi penelitian lebih lanjut mengenai penguatan koeksistensi damai dalam rangka multikulturalisme atau kebhinnekaan di dalam konteks yang lebih luas dan komprehensif yang mengintegrasikan tiga ruang lingkup sekaligus, yaitu institusi pendidikan formal, keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, ke depan dapat diinstitutionalisasi langkah-langkah sistemik untuk menjadikan lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai trilogi lembaga pokok yang menjalankan peran sinergis dalam mencegah destruksi multikulturalisme atau kebhinnekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Setting Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil setting waktu 2 (dua) tahun. Tahun pertama direncanakan untuk tahun anggaran 2018, yaitu selama kurang lebih selama 6 (enam) bulan. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di beberapa tempat yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Bali, dan Kalimantan Barat.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan *research and development* (R&D). Penelitian dengan teknik pengumpulan data mendalam dan analisis data secara induktif dilakukan untuk menemukan informasi-informasi, preposisi-preposisi, dan bahan-bahan penting sesuai dengan tujuan penelitian. Hasilnya kemudian dijadikan bahan untuk mengembangkan model pengembangan multikulturalisme digital. Model tersebut kemudian diujicobakan secara terbatas untuk kemudian dievaluasi dan direvisi jika memang dibutuhkan.

C. Sumber Data dan Subjek Penelitian

Sumber data penelitian ini, mengikuti klasifikasi Suharsimi Arikunto (1999, 2002), adalah *paper* dan *person*. Paper yang dimaksud adalah literatur-literatur/kepuustakaan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan sumber data berupa person dapat juga disebut sebagai subjek penelitian.

Subjek penelitian ini adalah para guru dan siswa-siswa SMP di lokasi-lokasi penelitian sebagaimana di atas. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan kombinasi antara *purposive* dan *snowball*.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Secara umum teknik pengumpulan dan analisis data dibagi menjadi dua kelompok, *desk study* dan *field study*. *Field study* meliputi:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*), untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh aspek yang ditekankan dan relevan dengan masalah penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir yang ditekankan untuk mengungkap informasi yang relevan dengan masalah penelitian.
2. Observasi, untuk memperoleh informasi dengan jalan meninjau obyek penelitian untuk melihat realitas yang terjadi di lapangan.

Sedangkan *desk study* meliputi:

1. Studi literatur, teknik pemanfaatan data-data sekunder serta data tertulis lainnya mengenai obyek yang diteliti.
2. *Peer Discussion*, diskusi dengan sejawat untuk menguatkan konstruksi analitik dan teoritik hasil sementara analisis data.
3. *Focus Group Discussion (FGD)*, untuk memperkaya dan semacam “uji publik” analisis dan hasil sementara atau *progress* hasil penelitian.

Wawancara mendalam, observasi dan studi literatur digunakan untuk mengidentifikasi inisiatif yang dilakukan oleh guru-guru Pendidikan

Kewarganegaraan untuk memperkuat multikulturalisme dan koeksistensi damai melalui dunia maya. Sedangkan PD dan FGD digunakan untuk mengembangkan multikulturalisme digital sebagai intervensi daring untuk memperkuat koeksistensi damai dan mengembangkan rancangan kebijakan dalam mendorong penguatan peran guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk menguatkan koeksistensi damai dalam kebhinnekaan Indonesia.

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data induktif kualitatif. Tahapan analisis yang digunakan adalah: 1) reduksi data, 2) display data, serta 3) kesimpulan dan verifikasi.

E. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi, yaitu suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu (Moleong, 2002: 178). Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari *person* dan *paper* (hasil wawancara mendalam dan dokumentasi) atau *paper* dengan *paper*, atau *person* dengan *person* lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prakarsa Guru dalam Mengembangkan Multikulturalisme Digital

Mengingat bahwa dalam sistem pendidikan di Indonesia, tidak ada program formal yang bersifat kurikuler dan non kurikuler mengenai pendidikan multikultural, apalagi yang bersifat digital, maka multikulturalisme digital sangat bergantung kepada inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh para guru pendidikan kewarganegaraan. Dalam observasi yang dilakukan oleh penulis, beberapa inisiatif awal multikulturalisme digital sudah dilakukan oleh guru-guru pendidikan kewarganegaraan, antara lain dalam beberapa bentuk berikut.

Pertama, pengembangan e-learning pendidikan kewarganegaraan. Beberapa penyedia layanan e-learning seperti *moodle* telah diinstrumentasi dengan cukup baik oleh para guru untuk mengembangkan multikulturalisme digital, paling tidak sebagai bagian dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diampunya.

Dalam e-learning tersebut, guru memberikan ruang kepada siswa untuk melakukan diskusi mengenai keberagaman atau kebhinnekaan yang secara objektif merupakan realitas alamiah dan konsensus politik para pendiri negara. Warga internet yang seringkali disebut sebagai *netizen* (akronim dari *internet citizen*) dapat mendiskusikan identitas masing-masing melalui wacana-wacana yang berkembang di sekitar mereka.

Untuk konteks Indonesia dimana literasi media dan literasi digitalnya belum baik, bentuk ini mengandung kerumitan tersendiri, sebab menuntut

kompetensi dan literasi digital yang cukup baik terhadap para guru. Kecuali didampingi oleh tim teknis operator e-learning, tidak banyak guru terutama guru-guru yang berusia tua yang dapat mengembangkan e-learning dalam bentuk ini. Selain itu, e-learning model ini juga menuntut kemampuan siswa dalam pemanfaatan fitur dan layanan yang sangat detil dan kompleks.

Kedua, dalam bentuk website dan blog pribadi. Mulai banyak guru pendidikan kewarganegaraan yang berinisiatif mengembangkan website sederhana dan blog pribadi dari penyedia layanan blog gratisan sebagai panggilan jiwa untuk mengajak netizen, khususnya anak-anak muda yang memiliki *concern* terhadap isu-isu kewarganegaraan, untuk mendiskusikan isu-isu kewarganegaraan yang sedang actual menjadi wacana publik.

Baik bagi guru sebagai owner sekaligus administrator maupun para netizen, multikulturalisme digital yang dikembangkan dalam bentuk ini lebih memudahkan akses dan mengundang partisipasi dibandingkan dengan bentuk yang sebelumnya. Sebagai administrator sebuah blog atau website dengan engine *web blog*, seperti *wordpress*, guru akan dengan mudah mengendalikan dan mengarahkan informasi, diskusi, sharing, dan dialog digital netizen mengenai fenomena keberagaman dengan segala masalah dan tantangannya di dunia maya. Pun dengan para pengakses, mereka akan lebih mudah beraktivitas dan berinteraksi dengan administrator dan sesama netizen.

Ketiga, dalam bentuk media sosial. Penggunaan media sosial merupakan media paling sederhana namun sekaligus paling cair dalam mengembangkan multikulturalisme digital. Kekuatan terbesar dalam penggunaan media sosial

sebagai wahana multikulturalisme digital adalah dari sisi akses dan sudiens. Dari sisi akses, baik bagi administrator maupun user, penggunaan media sosial nyata-nyata sangat mudah mengingat media tersebut dapat diakses dengan multi platform, mulai dari desktop, laptop, tablet hingga handphone. Selain itu, dari sisi audiens, pemilihan bentuk multikulturalisme digital dengan saluran ini jelas memiliki jangkauan audiens yang lebih luas, mengingat sebagian besar netizen di Indonesia memiliki akun media sosial, bahkan beberapa media sosial, khususnya di kalangan netizen muda.

Oleh karena itu, para guru kewarganegaraan dapat secara lebih intensif menjadikan lini masa media sosial mereka untuk mendiskusikan isu-isu aktual kebudayaan dan antar kebudayaan agar dengan demikian mereka memiliki kebiasaan mendiskusikan identitas kultural masing-masing dan dalam kaitannya dengan identitas kultural yang berbeda di luar mereka. Dengan begitu, diharapkan para netizen muda akan memiliki kesadaran kultural mengenai identitas dirinya, mengakui dan mengenal identitas berbeda di luar dirinya, dan pada akhirnya dengan sepenuh hati memiliki kesadaran dan keinginan untuk menghormati berbagai identitas yang berbeda yang berada di luar dirinya.

Lalu multikulturalisme seperti apa yang dibayangkan oleh para guru melalui prakarsa-prakarsa yang mereka bangun dalam mengembangkan multikulturalisme digital melalui dunia maya; media sosial maupun situs web?

Mengacu pada konsepsi yang diajukan oleh Parekh (1997: 8), sebagaimana peneliti sajikan sebelumnya pada Bab II laporan ini, multikulturalisme dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori. *Pertama*,

isolasionis, yang mengacu kepada masyarakat yang berbagai kelompok kultural yang ada di dalamnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal antara yang satu dengan yang lainnya.

Melalui wawancara dengan para narasumber di beberapa wilayah, peneliti menyimpulkan corak multikulturalisme isolasionis berkembang di dua kelompok daerah: (1) Daerah-daerah dengan pengalaman konflik di masa lalu. Konflik telah meninggalkan berbagai tingkat trauma sosial. Trauma tersebut meningkatkan kehati-hatian hampir seluruh pranata sosial-kemasyarakatan. Kehati-hatian tersebut memiliki dimensi ganda. Di satu sisi meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian agar tidak terjadi konflik yang sama di waktu-waktu yang akan datang, namun di sisi lain juga meningkatkan kecemasan sosial (*social anxiety*) yang mendorong terjadinya berbagai bentuk kecanggungan yang menyebabkan setiap pihak menahan diri, sehingga interaksi antar elemen multikultural terjadi secara minimalis. Beberapa wilayah di Kalimantan Barat termasuk dalam kecenderungan ini. (2) Daerah-daerah yang relatif homogen dengan proporsi minoritas yang sangat kecil. Dalam situasi ini, ada kecenderungan multikulturalisme berkembang minimalis dimana masing-masing pihak saling otonom sehingga interaksi yang terjadi antar identitas sangat minimal. Multikulturalisme berkembang namun dengan cara isolasionis.

Kedua, akomodatif, yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Multikulturalisme kategori ini terjadi

dalam situasi mayoritas dalam kelompok sosial lebih banyak berorientasi pada kepentingan-kepentingan minoritas. Sehingga setiap kebutuhan dan kepentingan kultural minoritas diakomodasi dalam relasi-relasi dengan mayoritas.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber, kecenderungan multikulturalisme tipe ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang relatif homogen. Dalam situasi demikian, pihak mayoritas cenderung mengambil posisi sebagai akomodator bagi kepentingan-kepentingan minoritas.

Ketiga, otonomis, yaitu masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima.

Multikulturalisme jenis ini, berdasarkan wawancara dengan para narasumber dan informan, berkembang dalam masyarakat yang memiliki heterogenitas dengan tata kelola yang relative baik. Di Singkawang Kalimantan Barat misalnya, multikulturalisme jenis inilah yang sedang diupayakan dan saat ini secara riil dipraktikkan dalam tata kehidupan masyarakat di Singkawang.

Keempat, kritikal atau interaktif yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu *concern* dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Multikulturalisme

jenis ini cukup ideal, sehingga enklaf-enklaf subcultural berinteraksi secara terbuka dan kritis satu sama lain.

Kelima, kosmopolitan, masyarakat ini berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat dimana setiap individu tidak lagi terikat dan *committed* kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Multikulturalisme jenis inilah yang paling ideal, dimana tidak ada lagi sekat-sekat mayoritarianisme yang membelenggu relasi-relasi antar subkultur dalam kebinekaan.

B. Kebutuhan Pengembangan Multikulturalisme Digital

Seperti disampaikan oleh Banks, sebagaimana sudah diulas oleh peneliti pada Bab Kajian Teori, Pendidikan multikultural merupakan pendidikan untuk *people of colors* (James Banks, 1992: 3). Menggunakan kacamata tersebut, pada dasarnya pendidikan multikultural adalah soal bagaimana mendidik subjek didik mengenai bagaimana hidup di tengah-tengah realitas masyarakat yang beraneka warna. Sedangkan Sleeter mengatakan bahwa pendidikan multikultural merupakan sekumpulan proses yang dilakukan oleh sekolah untuk menentang kelompok yang menindas (1994: 1). Konsepsi ini mengakui bahwa dalam faktual hubungan kemasyarakatan, terjadi relasi fungsional yang timpang antar kelas sosial, ekonomis, dan kultural. Akibatnya, struktur penindasan bekerja, dari yang satu atas yang lainnya, dalam ketimpangan tersebut.

Dalam konteks itu, perkembangan teknologi internet memungkinkan

pendidikan multikultural yang lebih progresif dan serba mudah diakses, terutama untuk kalangan anak muda generasi Y dan Z yang dalam kesehariannya menjadi konsumen dari lalu lintas informasi di dunia maya. Dengan demikian, pembentukan watak, mentalitas, *mindset*, dan perspektif yang dimiliki generasi muda tersebut akan sangat dipengaruhi oleh antara lain persebaran informasi dan aktivitas di dunia maya tersebut. Harus segera mendapat catatan bahwa akses dan pengaruh dunia maya terhadap karakter anak muda tidak selalu dalam konotasi yang serba positif. Dalam konteks itulah pendidikan multikultural melalui pendidikan multikultural secara digital sangat strategis untuk dilakukan.

Bagaimana pendidikan multikultural itu dilakukan? Meminjam perspektif James Banks (1990), terdapat beberapa dimensi yang saling berkaitan satu sama lain. Beberapa dimensi tersebut adalah: Pertama, *content integration*. Dimensi ini mengidealkan pendidikan multikultural sebagai ruang yang mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu. Kedua, *the knowledge construction process*. Dimensi pendidikan multikultural membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Ketiga, *an equity pedagogy*. Dimensi ini menghendaki metode pengajaran yang menyesuaikan dengan cara belajar pembelajar (*learners*) yang beragam sesuai dengan latar belakang masing-masing, baik dari segi ras, budaya (*culture*) ataupun sosial. Keempat, *prejudice reduction*. Pendidikan multikultural memiliki dimensi untuk mengurangi prasangka atau prejudis tentang sebuah identitas kultural.

Dalam spectrum konseptual demikian, pendidikan multikultural bukan

hanya penting, namun lebih dari itu mendesak, apalagi jika dikaitkan dengan fenomena actual mengenai masalah tatakelola keberagaman dan kebinekaan di tengah-tengah perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan internet. Multikulturalisme digital dalam bentuk pengembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multicultural dalam bentuk aplikasi internet berbasis web atau internet menjadi alternatif solusi bagi penguatan aspek-aspek kompetensi kewarganegaraan dalam tata kelola keberagaman.

Pertanyaannya kemudian, apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pengembangan multikulturalisme digital tersebut? Dalam wawancara dengan para narasumber, dihasilkan beberapa insight mengenai kebutuhan-kebutuhan yang mesti dipenuhi berkaitan dengan pengembangan multikulturalisme digital. *Pertama, high performance.* Aplikasi multikulturalisme digital harus memiliki *performance* yang tinggi. Meskipun aplikasi tersebut digunakan secara bersamaan oleh beberapa user, performa aplikasi harus tetap baik dengan kecepatan akses yang dapat diterima.

Kedua, kemudahan untuk digunakan. Multikulturalisme digital yang dikembangkan harus memiliki sifat *easy to use*. Penggunaan aplikasi tersebut sederhana, mudah, dan tidak rumit, sehingga tidak membutuhkan proses yang lama bagi seorang user untuk mempelajari dan beradaptasi dengan aplikasi tersebut.

Ketiga, kehandalan atau reliability. Aplikasi multikulturalisme digital yang akan dikembangkan harus memenuhi sifat handal. Kehandalan yang dimaksudkan adalah mengenai bagaimana aplikasi tersebut melaksanakan fungsinya dengan teliti, cermat, serta sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan.

Keempat, kemampuan beradaptasi (*adaptability*). Multikulturalisme yang dikembangkan harus mampu beradaptasi dengan perubahan –perubahan teknologi yang terjadi di dunia internet atau dunia maya. Kemampuan beradaptasi ini berkaitan dengan dua aspek aplikasi yang dikembangkan; yaitu pada aspek kontennya dan pada aspek teknis pengembangan aplikasinya.

Kelima, interaktivitas. Di dunia maya yang berkembang sangat pesat, kemampuan berinteraksi antar pengguna, baik pengelola maupun *user* pada umumnya, menjadi kebutuhan yang mendesak. Pengembangan multikulturalisme digital harus memenuhi aspek ini.

Keenam, mobilitas. Aplikasi multikulturalisme yang akan dikembangkan harus memiliki sifat mobilitas. Artinya ia tidak melulu hanya bisa diakses melalui satu perangkat computer yang tidak dapat dibawa atau dipindah-pindah. Di era kecanggihan teknologi (*technological advance*) mobilitas menjadi kriteria yang dibutuhkan, sebab hampir semua orang yang berinteraksi dengan dunia internet memiliki kebutuhan tinggi akan mobilitas.

Ketujuh, penampilan yang baik. Aplikasi multikulturalisme digital yang dibuat harus memiliki *interface* atau antarmuka yang menarik. Dengan begitu, harapannya user yang berhadapan dengan isu berat multikulturalisme dapat menjaga *mood* baik melalui interaksi dengan antarmuka aplikasi ini.

C. Pengembangan Aplikasi Multikulturalisme Digital

Berdasarkan analisis data yang sudah dihasilkan, baik pada tahun pertama maupun tahun kedua penelitian ini, tim peneliti akhirnya melakukan Focus Group

Discussion (FGD) dilanjutkan dengan Workshop untuk mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web. Aplikasi tersebut, sebagaimana tujuan penelitian ini, dimaksudkan untuk mengembangkan intervensi online bagi perawatan dan penguatan kebinekaan Indonesia, sesuai dengan perkembangan era disrupsi dan revolusi industry 4.0. Aplikasi tersebut beralamat di www.mudig.id.

Secara umum terdapat enam fitur utama dalam aplikasi ini, yaitu:

1. Literasi mengenai multikulturalisme dan kebinekaan Indonesia
2. Perjumpaan online antar identitas dalam kebinekaan
3. Konsultasi dan konseling kebinekaan
4. Kolom kebinekaan
5. Opini kebinekaan
6. Jurnal kebinekaan.

Pada bagian antarmuka aplikasi tersebut terdapat fasilitas yang merupakan fitur utama aplikasi dengan tampilan sebagai berikut:



Ada apa di MuDig?



Kebinekaan Kita

MuDig menyediakan artikel yang akan menambah wawasan tentang keragaman di sekitar kita

[Lihat semua artikel!](#)



Berbagi dan Berjumpa

MuDig menyediakan fitur Chat dan Forum Diskusi untuk berbagi dan berjumpa antar sesama. Fitur Chat hanya dapat dilakukan oleh member yang terdaftar, Fitur Forum Diskusi dipandu oleh Konselor dan Admin kami, serta dapat diikuti oleh Member dan bukan Member.

[Ikuti Forum disini](#)



Konsultasi kebinekaan

Jika Anda memiliki masalah tentang kebinekaan, Anda bisa berkonsultasi dengan Konselor kami. Fitur ini hanya berlaku jika Anda telah menjadi member MuDig.

[Masuk sebagai konselor](#)

[Masuk sebagai member](#)

Artikel Terbaru



Bersatu dalam Kebinekaan

Halili, M.A

30 Sep 2019 16:38:54

Kategori : Sosial dan Budaya

[Lihat Selengkapnya](#)



Konsep Multikulturalisme

Dr. Suharno, M.Si

30 Sep 2019 16:36:32

Kategori : Sosial dan Budaya

[Lihat Selengkapnya](#)



Bhinneka Tunggal Ika: Menceramati Sasanti Bangsa dan Negara

Halili, M.A

30 Sep 2019 16:34:33

Kategori : Sosial dan Budaya

[Lihat Selengkapnya](#)

Kolom Terbaru

Mengelola Residu Kontestasi Ideologi

Halili, M.A pada 30 Sep 2019 16:13:51

Pergeseran Massa dalam Politik Kita

Halili, M.A pada 30 Sep 2019 16:11:02

Opini Terbaru

Revivalisme Pancasila

Halili, M.A. pada 21 Sep 2019 23:34:52

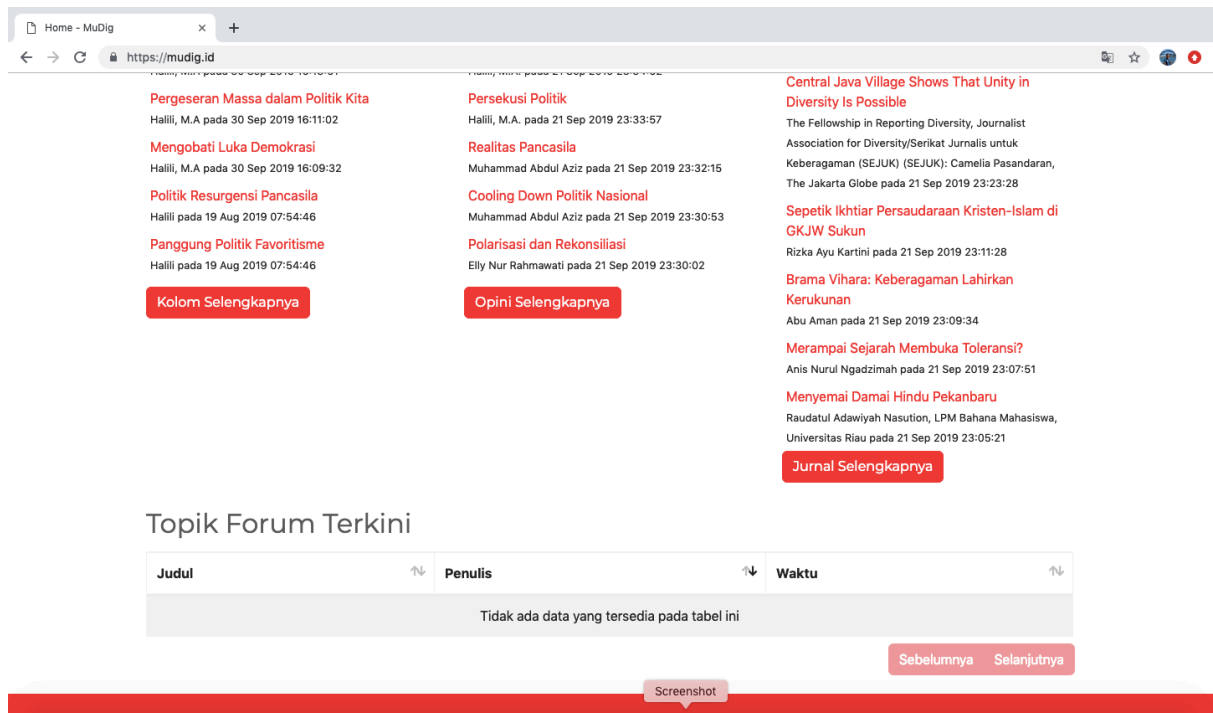
Persekusi Politik

Halili, M.A. pada 21 Sep 2019 23:33:...

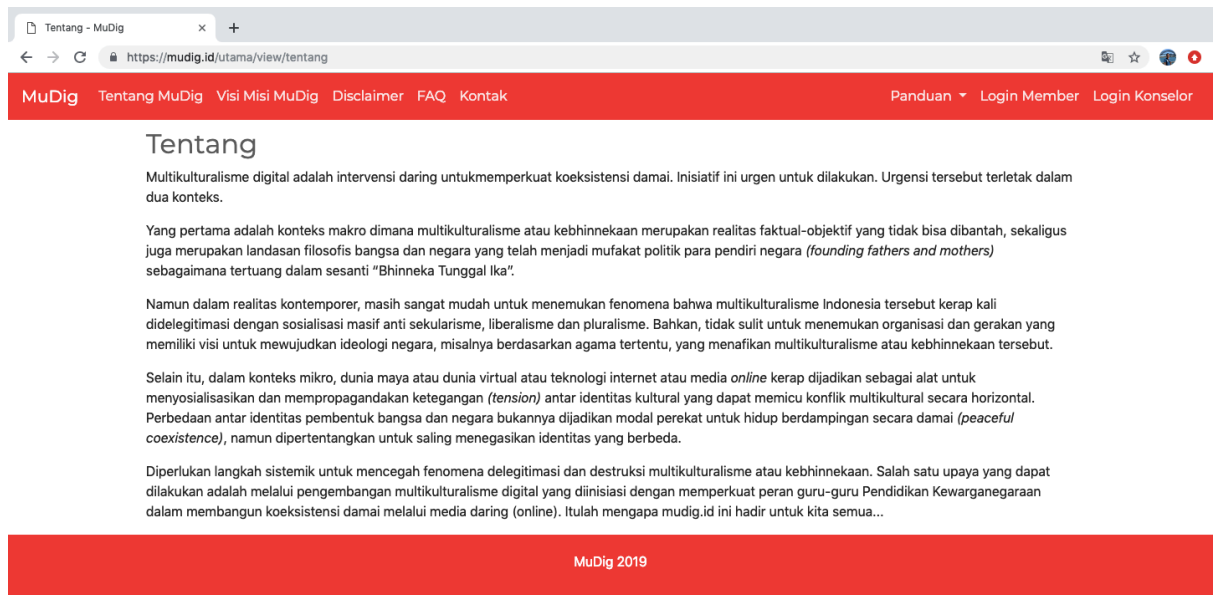
Jurnalisme Bineka Terbaru

Central Java Village Shows That Unity in Diversity Is Possible

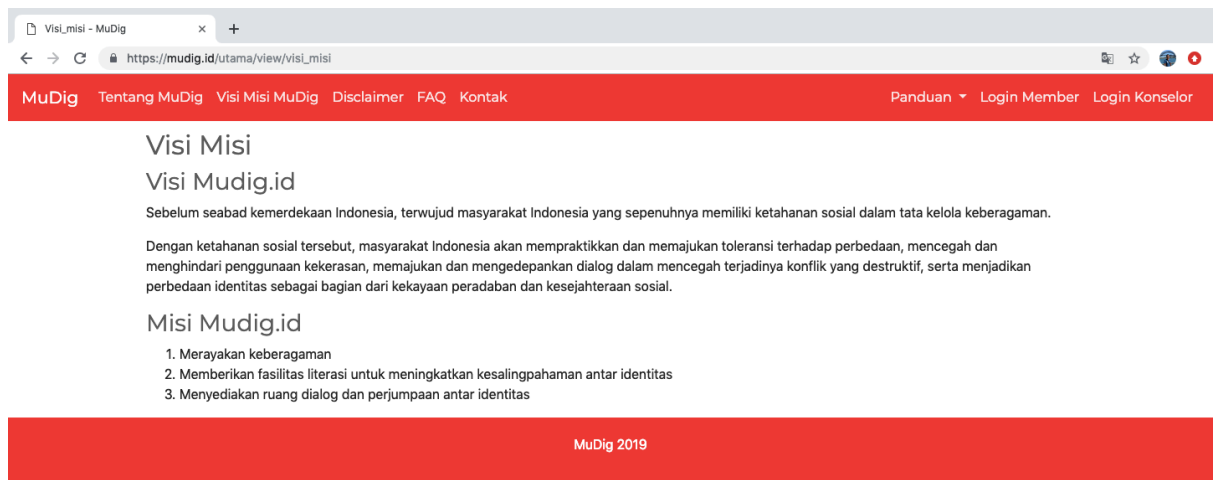
The Fellowship in Reporting Diversity, Journalist



Pada bar bagian atas depan dari aplikasi ini memuat beranda yang berisi tentang “Mudig.id” sebagaimana tampilan berikut ini.



Pada bagian bar beranda yang sama, ditampilkan “Visi Misi Mudig.id” yang disesuaikan dengan visi atau tujuan dari intervensi multikulturalisme digital ini, yaitu sebagai berikut.



Untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas online dari Mudig.id, baik dalam forum perjumpaan online maupun dalam penulisan pengembang aplikasi memberikan ketentuan disclaimer aplikasi sebagai berikut.

Disclaimer

Seluruh layanan yang diberikan mengikuti aturan yang berlaku dan ditetapkan oleh **MuDig.id**.

Pasal Sanggahan (Disclaimer):

MuDig.id tidak bertanggung-jawab atas tidak tersampainya data/informasi yang disampaikan oleh pembaca melalui berbagai jenis saluran komunikasi (e-mail, sms, online form) karena faktor kesalahan teknis yang tidak diduga-duga sebelumnya **MuDig.id** berhak untuk memuat, tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca. Data dan/atau informasi yang tersedia di **MuDig.id** hanya sebagai rujukan/referensi dan konsultasi, dan tidak diharapkan untuk tujuan perdagangan saham, transaksi keuangan/bisnis maupun transaksi lainnya. Walau berbagai upaya telah dilakukan untuk menampilkan data dan/atau informasi seakurat mungkin, **MuDig.id** dan semua mitra yang menyediakan data dan informasi, termasuk para pengelola halaman konsultasi, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang disajikan **MuDig.id**. Semua hasil karya yang dimuat di **MuDig.id** baik berupa teks, gambar, suara dan video serta segala bentuk grafis adalah menjadi hak cipta **MuDig.id**.

Kebijakan Konselor

Konselor harus login dalam laman konselor untuk mengakses fitur konselor. Konselor diharuskan untuk mengisi data diri sebelum masuk ke dalam laman konselor. Sesi aktif login konselor berlaku untuk sekali login. Saat sesi aktif berakhir, konselor akan diminta login konselor untuk mengakses fitur konselor lagi. Konselor dapat menjawab pertanyaan member, menuliskan konten opini, jurnalisme dan artikel kebinekaan.

Kebijakan Member

Member harus login dalam member untuk mengakses fitur member yaitu memberikan pertanyaan kepada konselor dalam laman diskusi. Member diharuskan untuk mengisi data diri sebelum masuk ke dalam laman member. Sesi aktif login member berlaku untuk sekali login. Saat sesi aktif berakhir, konselor akan diminta login member untuk mengakses fitur member lagi.

Peringatan

Konselor dan Member

1. Segala sesuatu baik perkataan, gambar, video, dan real time chat setiap waktu selalu dipantau oleh admin **MuDig.id**.
2. Konselor dan Member yang melanggar kebijakan interaksi akan diberi tiga (3) kali peringatan.
 - a. Peringatan pertama dengan tegur tertulis dari admin.
 - b. Peringatan kedua dengan pembatasan layanan.

Screenshot

Peringatan

Konselor dan Member

1. Segala sesuatu baik perkataan, gambar, video, dan real time chat setiap waktu selalu dipantau oleh admin **MuDig.id**.
2. Konselor dan Member yang melanggar kebijakan interaksi akan diberi tiga (3) kali peringatan.
 - a. Peringatan pertama dengan tegur tertulis dari admin.
 - b. Peringatan kedua dengan pembatasan layanan.
 - c. Peringatan ketiga dengan membanned akun member atau konselor.
3. Member dan Konselor yang memberikan kontribusi berupa Opini akan melewati izin dari admin sebelum konten mereka dapat terunggah.
4. Member dan Konselor yang memberikan kontribusi berupa jurnalisme bineka dapat secara langsung memberikan kontribusinya tanpa melewati izin admin dan konselor atau member yang mengupload memiliki tanggungjawab terhadap tulisannya sendiri.

Ketentuan Jurnalisme Bineka dan Opini

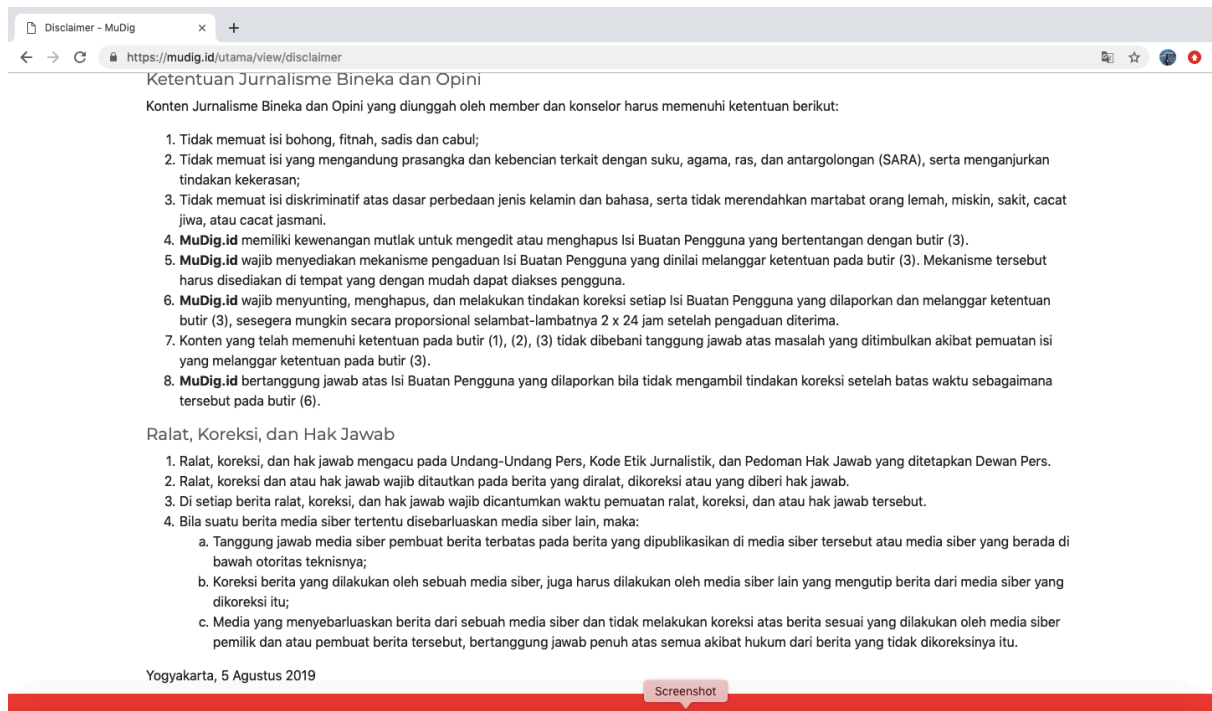
Konten Jurnalisme Bineka dan Opini yang diunggah oleh member dan konselor harus memenuhi ketentuan berikut:

1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
4. **MuDig.id** memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (3).
5. **MuDig.id** wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (3). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
6. **MuDig.id** wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (3), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
7. Konten yang telah memenuhi ketentuan pada butir (1), (2), (3) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (3).
8. **MuDig.id** bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (6).

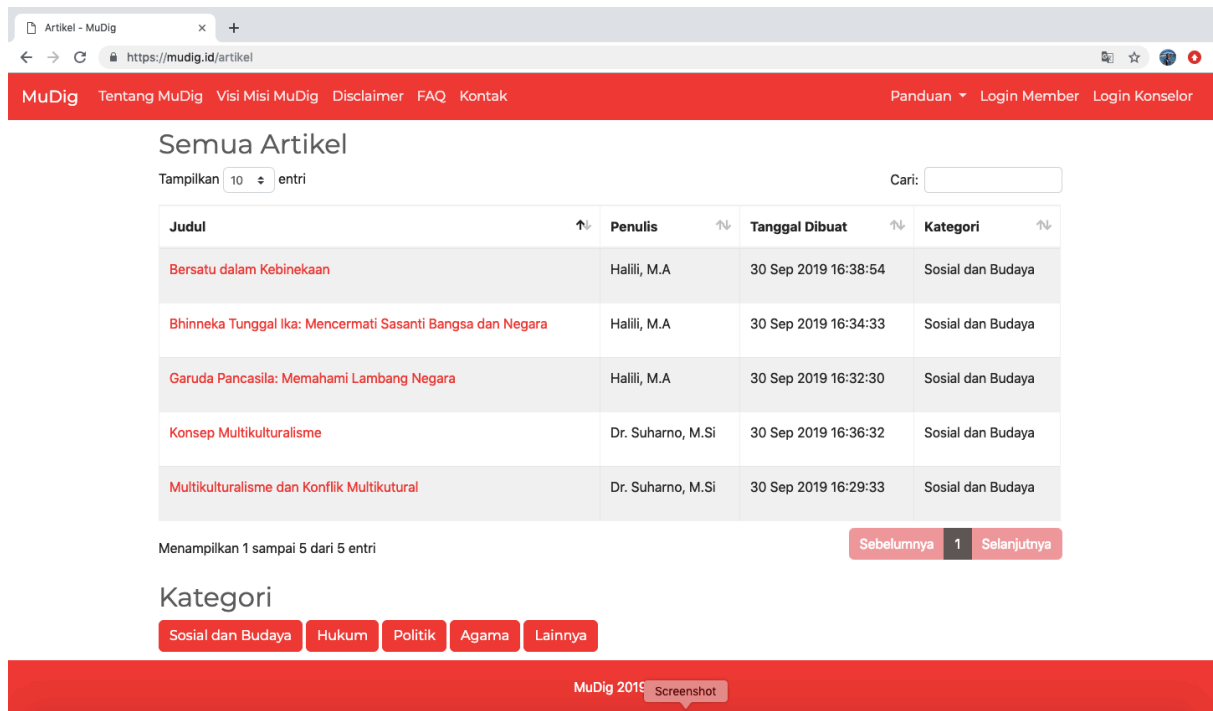
Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

1. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

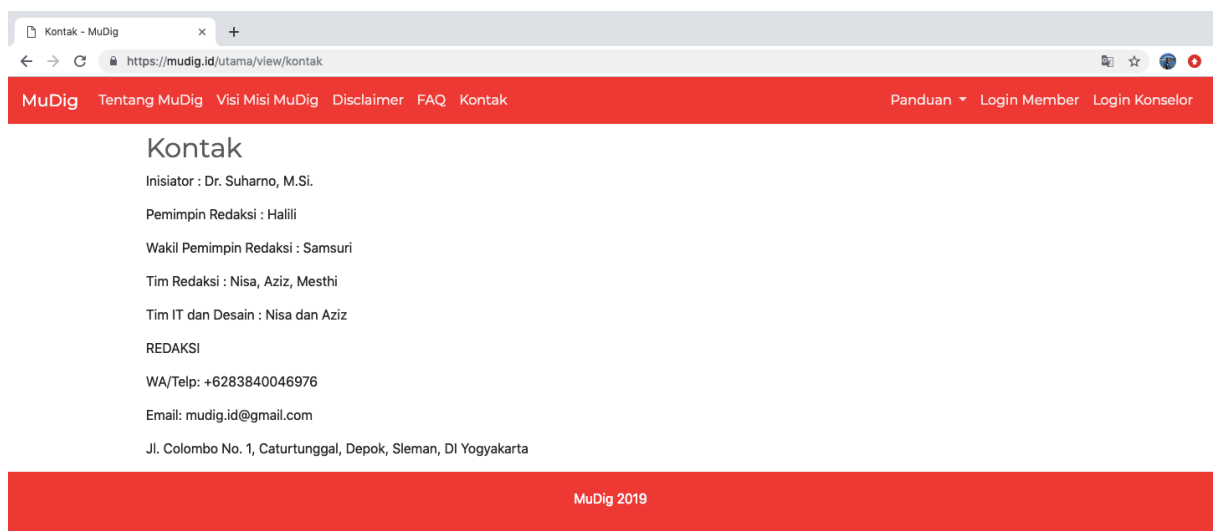
Screenshot



Adapun fitur literasi kebinekaan atau multikulturalisme yang utama dalam intervensi ini adalah mengenai lima materi utama; 1) Bersatu Dalam Kebinekaan, 2) Bhineka Tunggal Ika: Mencermati Sasanti Bangsa dan Negara, 3) Garuda Pancasila: Memahami Lambang Negara, 4) Konsep Multikulturalisme, serta 5) Multikulturalisme dan Konflik Multikultural. Adapun tampilan fitur literasi utama dalam aplikasi adalah sebagai berikut.



Sedangkan kontak aplikasi sebagai “persons on duty” dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari ulasan terdahulu dapat diambil beberapa kesimpulan berikut. *Pertama*, multikulturalisme digital merupakan salah satu alternatif terobosan untuk mengatasi persoalan, dengan program utama berupa penyediaan *online discussion boards*, yang dapat diperluas dengan tekanan pada pengakuan dan penghargaan atas perbedaan (*difference*) bukan hanya atas kebudayaan (*culture*) dalam perspektif multikulturalisme.

Kedua, dalam pengalaman Indonesia, Pendidikan Multikultural di persekolahan dikembangkan tidak dalam bentuk mata pelajaran yang berdiri sendiri, namun dalam bentuk subjek terintegrasi pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, multikulturalisme digital juga dikembangkan melalui kegiatan informal dalam bentuk praktek pembelajaran tersendiri yang tidak diintegrasikan ke dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Ketiga, mengingat dalam sistem pendidikan di Indonesia tidak ada program formal yang bersifat kurikuler dan non kurikuler mengenai pendidikan multikultural, apalagi yang bersifat digital, maka pengembangan multikulturalisme digital sangat bergantung kepada inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh para guru pendidikan kewarganegaraan. Beberapa inisiatif awal multikulturalisme digital sudah dilakukan oleh guru-guru pendidikan kewarganegaraan, antara lain dalam beberapa bentuk: a) pengembangan e-learning pendidikan kewarganegaraan, .b)

dalam bentuk website dan blog pribadi, dan c) dalam bentuk media sosial.

Keempat, pengembangan multikulturalisme digital dalam bentuk aplikasi berbasis internet harus memenuhi beberapa kebutuhan berikut, yaitu; *high performance*, kemudahan untuk digunakan, kehandalan atau *reliability*, kemampuan beradaptasi atau *adaptability*, interaktivitas, mobilitas, dan penampilan yang baik.

Kelima, pasca pengembangan aplikasi berbasis digital, maka dibutuhkan sosialisasi dan kerjasama lebih lanjut dengan guru-guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di seluruh Indonesia untuk memperluas akses dan pemanfaatan website yang telah dikembangkan. Hingga penulisan laporan akhir ini kerjasama dengan 10 guru telah dilakukan sehingga para guru tersebut bersedia untuk mengambil peran sebagai konselor online dalam aplikasi mudig.id.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat diajukan beberapa saran berikut. *Pertama*, kepada para pengambil kebijakan. Hendaknya dapat dipastikan bahwa perkembangan dunia digital yang luar biasa pesat hendaknya direspons dengan pengembangan aplikasi-aplikasi yang dapat mmenjadi antithesis atau menyediakan kontranarasi atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh dunia internet bagi kemajemukan Indonesia.

Kedua, para guru, khususnya pendidikan kewarganegaraan, hendaknya mulai mengembangkan pembelajaran multikulturalisme yang memanfaatkan kemajuan fasilitas-fasilitas di dunia maya. Multikulturalisme tidak hanya menuntut tersedianya ruang bagi interaksi antar unsur-unsur multikulturalisme di tengah-

tengah masyarakat.

Ketiga, para pengembang aplikasi multikulturalisme digital, hendaknya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan substantif pengembangan aplikasi dalam isu ini, sehingga multikulturalisme memanfaatkan ruang-ruang dan fasilitas di dunia maya dapat merepresentasi keberbedaan dengan interaksi antar unsur dalam kebinekaan di dunia nyata dalam ruang-ruang kelas pendidikan formal dan ruang-ruang kemasyarakatan dalam interaksi sosial keseharian secara langsung (*direct*) dalam dunia nyata (*real life*).

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, James A. (1990). *Teaching Strategies for the Social Studies*. New York: Longman
- _____ (1993). "Multicultural Education: Historical Development, Dimensions and Practice". *Review of Research in Education*
- Blum, Lawrence A. (2001). "Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar Ras: Tiga Nilai yang bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural", dalam Larry May dan Shari Colins-Chobanian, *Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultural*. Alih Bahasa: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Burnett, G. (1994). *Varieties of Multicultural Education: an Introduction*. Digest: Eric learning house on Urban Education
- Cogan, J. J. (1999). *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*. Bandung: CISED
- Hairus Salim dan Suhadi. 2007. *Membangun Pluralisme dari Bawah*. Yogyakarta: LKIS
- Leurs, Koen, Midden, Eva, dan Ponzanesi, Sandra. (2012). "Digital Multiculturalism in the Netherlands: Religious, Ethnic and Gender Positioning by Moroccan-Dutch Youth" *Religion and Gender* vol.2, no. 1 (2012) published by Routledge, 150-175
- Lindsey, Tim dan Pausacker, Helen. (2016). *Religion, Law and Intolerance in Indonesia*. Abingdon, UK and New York, USA: Routledge
- Modood, Tariq. (2007). *Multiculturalism: A Civic Idea*. Cambridge: Polity Press
- Nia Aprianingsih. (2014). "Dunia Maya dalam Perbandingan", dalam Nur Janti, dkk. *Online! Geliat Manusia dalam Semesta Maya*. Yogyakarta: Ekpresi Buku
- Parekh, Bhikku. (1997). "National Culture and Multiculturalism". dalam Kenneth Thomson (ed.). *Media and Culture Regulation*. London: Sage Publications
- _____ (2000). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge, Massachusset: Harvard University Press.
- Suharno. (2010). "Politik Rekognisi Dalam Peraturan Daerah Tentang Penyelesaian Konflik Di Dalam Masyarakat Multikultural: Studi Kasus terhadap

Perumusan dan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik di Sampit Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah”. *Disertasi pada Program Doktor Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.*

Wawan Tunggal Alam (ed.). (2000). *Bung Karno Menggali Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Yoga Hastyadi Widiartanto. 2016. “2016. Pengguna Internet di Indonesia Capai 132 Juta”. <http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta.>, diakses pada tanggal 2 Maret 2017)

LAMPIRAN 1.

LUARAN BERUPA ARTIKEL YANG DIPRESENTASIKAN DALAM
KONFERENSI INTERNASIONAL

Development of Digital Multiculturalism in Indonesia

Suharno, Samsuri, Halili

*Citizenship Education, Faculty of Social Sciences, Yogyakarta State University,
email: suharno1968@yahoo.com, samsuri@uny.ac.id, halili@uny.ac.id*

Abstract

In the Indonesian context, multiculturalism is one of the basic values forming the nation-state. However, we are recently living at a time when intolerant groups use cyberspace to create ideological tension. This is particularly the case among intercultural identities that differ primarily in terms of religion and/or other sociocultural factors.

This phenomenon should be responded through adequate attention and treatment in Indonesia, which has had so many traumatic tragedies with regard to multicultural conflicts, ethnic conflicts, and the like. For example, from 1952 to 2000 in West Kalimantan, conflict between different ethnicities has occurred at least 12 times. Therefore it is necessary to develop digital multiculturalism that can primarily be taught through the main agents of multicultural education in formal education, namely the Citizenship Education teachers. Intervention is required to establish a sort of "counter-propaganda" over the tensions between cultural identities those accidentally triggered by certain groups through cyberspace. The optimization of the teacher's role is very relevant due to their mandate to deliver multicultural education at least in the form of content integration.

Keywords: *Digital multiculturalism, citizenship education, teacher*

A. Introduction

The multiculturalism or diversity in Indonesia is theoretically an irrevocable fact. Many experts, such as Tim Lindsey and Helen Pausacker (2016) acknowledged the objective fact and consider Indonesia as a plural, diverse and multicultural nation.

Multiculturalism is also one of the building fundamental values of the nation-state. It is not only manifested as the conceptual philosophical values but also as the formal political nation-state foundation through the wording "Unity in Diversity" formally stated in the national emblem, Garuda Pancasila.

The peaceful coexistence as wished by the Founding fathers is the requisite of multiculturalism building and maintenance. In the context of describing the Just and Civilized Humanity principle, Sukarno states, "...never mind when people are living in different coexistence; yet, both living side by side. In English, it is called

coexistence, peaceful coexistence. It turns out to be, perhaps, not only possible more, but it turns obviously could (Alam [ed], 2000: 76-78).

However, the preliminary study showed that many intolerant groups have recently used the cyber space to bring ideological tension among the distinguished cultural identities based on the religion and other sociocultural identities in the forms of discourse, propaganda, hate speech, etc.

The phenomenon supposedly receives adequate attention and treatment due to many past traumatic experiences occurred in Indonesia dealing with multicultural and ethnic conflicts and the like. Between 1952 and 2000, for instance, conflict in West Kalimantan between various ethnic groups occurred at least 12 times. These conflicts include: disputes between Madurese and Dayak in 1952, the events of the expulsion of people who are ethnically Chinese by Dayaks in 1967, the riot between Madurese by Dayak ethnics in 1979 in Kalimantan, a dispute between Madurese and Dayak that occurred in 1983, riot between Dayak and Madurese happened in Sanggau Ledo in 1997, the conflict between Madurese and Dayaks in Kalimantan in 1998, the conflict between Malay and Madurese ethnics in Sambas and the riots between Pontianak Malay and Madurese ethnics which occurred on October 25, 2000. In addition, the multicultural conflict also took place in Sampit Kotawaringin Timur (Kotim), Central Kalimantan involving the Madurese and Dayak ethnics. In this conflict, hundreds even thousands of residents were confirmed dead, mostly Madurese. The conflict has also resulted in about 55 323 inhabitants refugee flows that cause abandonment, as evidenced by the death of 357 refugees, epidemics of disease, poor quality of life and inadequate sanitation. Wide impact that occurs in the form of an atmosphere of fear, psychological trauma, and thousands of people who lost possessions (Suharno, 2010:2).

Answering the situation, the digital multicultural development is urgently performed; moreover through the multicultural education agents of the formal education, that is citizenship education teachers. Furthermore, the digital world development allows the discourse exchange go fast and not avoided. Intervention is required to establish a sort of "counter-propaganda" over the tensions between cultural identities that accidentally triggered by certain groups through cyberspace. The optimization of the teacher's role is very relevant due to their mandate to deliver multicultural education at least in the form of content integration introduced by James Banks (1990: 3). In addition, their capacity of civic knowledge, civic disposition, and civic skills are generally adequate.

B. Multiculturalism and Online Technology

Multiculturalism, with its diversity and tendency toward its concepts and practices by Parekh (1997: 8) is classified into five types. *First*, isolationist, refers to a society with groups of cultural background individuals who autonomously live and interact with at least one another.

Second, accommodative, that is the plural society who has dominant culture, making certain adjustment and accommodation for the minority cultural needs. *Third*, autonomist, a plural society of which the main cultural groups are trying to actualize the equality with the dominant culture and accommodating the autonomous life of the political framework which is collectively accepted.

Fourth, critical or interactive, a plural society in which the cultural groups do not really concern on the autonomous cultural life, but demand more on building the collective culture which reflects and strains their distinguished perspectives. *Fifth*, cosmopolitan, this society tries to remove the cultural boundaries in order to build a society where every individual is no more tied and committed to certain cultures, but freely involved in an intercultural experiment and develop each cultural life.

The terms in use, “multiculturalism” is often interchangeable with pluralism. Reviewing multiculturalism more clearly, it is necessary to look the mapping proposed Bhikku Parekh about the multicultural society (Parekh, 2000: 103-106). *First*, a society which holds the common cultures, but in some cases, it has a belief and its practice which are different regarding the distinguished life zone and life style. Its people do not wish for building the alternative culture, but differ the cultures with their distinguished existence. Parekh calls this group as the *subculture diversity*.

Second, a group of society with the critical circles concerning various values and main principles of the dominant cultures, to reform and reconstruct the cultures. Parekh calls this as *the perspectival diversity*.

Third, a group of society which has different self-awareness, well-organized, and they have to live with the system of beliefs and practices of different beliefs. This phenomenon is called the *communal diversity*.

So, multicultural society is a society whose components represent one, two, or three of the classifications simultaneously. Different from pluralism that the scope covers the bigger sub-components, such as religion, ethnicity, and race. Multiculturalism involves the more “micro” components, like thinking and life styles.

As the connecting line of the above explanation, multiculturalism is a concept of cultural diversity society controlling, of the slightest level and cultural diversity scope, by giving a recognition for the diversity component existence. The recognition in contemporer phenomena is a demand. That’s why, no recognition, which means no demand, potentially brings up the conflicts.

Multiculturalism control is complex which cannot be handled by a single individual, such as the state government only. The complexity is increasing as the information and communication technology (ICT) is growing, in particular the internet which presents the virtual reality, an essential reality without physical existence. In the virtual reality, everyone freely makes up their identities under no law regulations, acknowledging her/himself as anyone and anywhere. If one wants to do it, anyone can false his/her identity (Nia Aprianingsih in Nur Janti et al., 2014: 6-7). The situations brings the tension and conflict between the monoculturalist or anti-pluralist easily contradistinguish the diversity of each cultural identity which can supposedly be led to have a balanced coexistence.

Of that context, digital multiculturalism is one of the alternatives of overcoming the issue through the main program that is called *online discussion boards* (Koen Leurs, Eva Midden dan Sandra Ponzanesi (2012: 150-175). The online features can be expanded on the recognition and appreciation for the difference and culture under multiculturalism perspective (Modood, 2007).

C. Citizenship Education as Multicultural Education

The multiculturalism education is an education for *people of colors* (James Banks, 1992: 3). Under the perspective, the multicultural education is basically how to educate the learners how to live in the midst of multi-colored society.

In another close perspective, Sleeter states that multicultural education is a set of processes performed by schools against the oppressive groups (1994: 1). This conception acknowledges that in the factual social relations do happen the poor functional relations between social classes, economics, and cultural. In that inequality oppression, the repression structure works one over the others.

Diversity on the one hand and practice or repressions potential between the various entities is the social phenomenon which receives adequate academic response through the multicultural education. It is an educative program aims at educating the citizens with diverse identities and backgrounds to co-exist peacefully in diversity (peaceful-coexistence) without self-repressions from the many to the few, and the strong against the weak.

In that context, the development of cyber world technology enables the more progressive and more easily accessed multicultural education, especially for the young generations Y to Z as the daily users of the information from the virtual reality. Thus, the character formation, mentality, mindset, and the perspectives of the young generations will be highly influenced, for instance, by the spread of information and virtual activities. It requires an immediate report that the access and influence of the virtual reality does not always bring the positive connotation all the way.

For the Indonesian scope, one of the breakthroughs to optimize in anticipating the negative impacts of the virtual reality which can distort the multiculturalism meaning, break and destroy the Unity in Diversity is fostering the multicultural education, including the use of cyberspace. James Banks (1990) brought a perspective that some dimensions are interrelated. They are: *first*, content integration. This dimension ideally puts forward the multicultural education as integrating space for the cultures and groups to illustrate the basic concept, generalizations, and theoretical subjects/ disciplines.

Second, the knowledge construction process. The multicultural education dimension leads students to understand the cultural implications into a subject. *Third*, an equity pedagogy. This dimension requires the teaching method adjustment of the various individual learners' backgrounds, both in terms of race, culture or social. *Fourth*, prejudice reduction. Multicultural education has a dimension to reduce bias or prejudice concerning a cultural identity.

This multicultural education can be integrated into citizenship education or in a broader perspective since it is basically the multicultural education itself. As stated by Cogan (1999), *citizenship education* is actually a means of education designed to guide and develop smarter citizen in all subsystems of formal, non-formal, and informal education. The good and smart citizen is constructed by the citizenship education, involving the education coverage in a school or other formal education institutions, family, and neighbourhood. Connecting to the objective framework of the diverse society, citizenship education aims at building the

citizenship and civilized citizen in a multicultural society.

Citizenship education as a multicultural education is potentially strategic in implementing three main educational elements as introduced by Blum (2001: 19). *First*, asserting one's cultural identity, learning and assessing the cultural heritage as well. This element reflects that the individual's cultural internalization is the most fundamental part in cultural relations. A person is believed to be difficult to put appreciation on the cultural diversity if he has not got himself the deepest substance of his own culture. This is the first part to actualize in a multicultural education process.

Second, respect and desire to understand and learn the ethnicity or other cultures. Having someone internalize the cultural values, he is required to understand, appreciate, and build his desire to learn new cultures apart from his own. This element is an advanced stage of the previous element in the multicultural education.

Third, assessing and feeling delighted with the diversity within the culture; that is looking at the presence of groups of different cultures in the society which is seen as something positive to put respect on and be maintained. This element is the outermost and highest element of a multicultural education process, in which every learner is intended to make others' cultures as unseparable parts of his cultural existence. The diversity in the culture is the holistic building of human life as the social creatures.

Thus, associating the citizenship education with multicultural education is not only conceptually relevant but it is performed as getting the urgency if it is associated with the actual phenomena of the diversity challenge and pluralism in the middle of the rapid internet technology development.

Based on the experiences of Indonesia, multicultural education in schools is developed not in the form of a stand-alone subject, but an integrated Civics subject in the primary and secondary education instead. In the latest curriculum which is currently implemented in Indonesia, particularly in schools, the scope of citizenship education covers four main materials, namely Pancasila as the nation-state principles, Constitution of Republic Indonesia as its constitution, and Diversity in Unity as its motto.

From the scope, the citizenship education obviously provides a flexible scope for the integration of multiculturalism education. The digital multiculturalism development can be integrately conducted in the citizenship education.

The multiculturalism digital development is also performed through the informal activities in the form of unbound learning practice outside the class, not integrated into the citizenship education. This initiative is a necessity due to the extremely high internet access by the Indonesians. Data released by *Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) (Association of Indonesian Internet Networking Operators)* in 2016 show the high internet users in Indonesia. According to a survey conducted by *APJII*, more than a half of the Indonesian citizens are now connected to internet. The survey conducted during 2016 reveals that 132.7 millions of Indonesians have been connected to the internet. While the total number of Indonesian citizens is 256.2 millions (Widiartanto, 2006: <http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/150647727/2016.pengguna>).

internet.di.indonesia.capai.132.juta, accessed on March 2, 2017). The context provides a very broad scope for the more systematic digital multiculturalism development, especially the one developed through the citizenship education in a broad context and not only in the classes and schools, but also in the middle of the society.

D. The role of Teachers in Developing Digital Multiculturalism

Given that Indonesian education system does not have either curricular and non-curricular formal programs or digital program for the multicultural education; the digital multiculturalism relies on the citizenships education teachers' initiatives. Based on the researcher's observation, some initial digital multiculturalism initiatives are as follows.

First, the e-learning development of citizenship education. Some e-learning services provide, such as *moodle*, have been well equipped by the teachers to develop the digital multiculturalism, at least as part of the lessons taught.

In the e-learning, the teachers provide opportunities for the students to conduct discussion about the diversity and pluralism that is objectively natural reality and political consensus of the founding fathers. The internet community users often called netizen (*acronym of internet citizen*) can discuss their individual identity through discourses which develop around them.

In the Indonesian context where media literacy and digital literacy are not good, this form is categorized complex for it requires the good competition and digital literacy from the teachers except if they are guided by the e-learning technical operators. There are not many teachers, especially the senior teachers, who can develop this e-learning basis, besides it also requires the students' ability to perform the features and the very detailed and complex services.

Second, the website and personal blog. There have been many citizenship education teachers initiate to develop a simple website and personal blog from free service providers to invite netizen, especially the youths who concern on the citizenship issues to bring them into an actual discussion of a public discourse.

Both for the teachers as the owners and administrators, and for the netizen, this form digital multiculturalism which is currently developed provides an easy access and invites more participation than before. As a blog or website administrator with the web blog engine, such as wordpress, teachers can control and lead the information, discuss, share, and make a digital dialogue with the netizen regarding the diversity phenomenon with its all cyberspace problems and challenges. For the access users, it will provide them an ease to move and interact with the administrators and other netizen.

Third, in the form of social media. The use of social media is the simplest but the most reachable in developing the digital multiculturalism. The greatest strength in the use of social media as a means of digital multiculturalism is performed by its two sides, access and audience. In terms of access for both the administrators and the users, the use of social media is very easy given that the media can be accessed through multi platforms from desktop, laptop, tablet, and smartphone. While, in terms of audience, the digital multiculturalism selection of this channel absolutely reaches wide-range audience; moreover most netizen in

Indonesia have social media accounts, seven ome accounts for a user, particularly among young netizen.

Therefore, the citizenship teachers can intensively use their social media accounts to bring the actual cultural and its diversity issues into a discussion to make them accustomed to discuss their own cultural identities associated with the different ones from theirs and around. Thus, the young netizen have cultural awareness of their own, acknowledge and recognize their distinguished identities one another, and eventually they will have the consciousness and desire to respect what is different from themselves and theirs.

E. Conclusion

From the above discussion, the conclusions are drawn as follows. *First*, digital multiculturalism is one of the breakthrough alternatives addressing the issues in its major programs, such as provision of the online discussion with focus on respect on the differences not only the cultures under multiculturalism perspective.

Second, of the Indonesian experience, multiculturalism education at schools are developed not in the form of disintegrated lesson, but integrated instead, that is in Civics of the primary and secondary education levels. In addition, the digital multiculturalism is also developed through informal activities in the form of its own teaching practice, disintegratedly from the citizenship education subject.

Third, given the Indonesian education system which does not have either curricular or non-curricular formal programs, moreover non digital form of the multicultural education, the multicultural development relies on the citizenship education teachers' initiatives. Some initial digital multiculturalism initiatives performed by the teachers recently are in the forms of: a) e-learning development of citizenship education, b) website and personal blog, and c) social media.

F. Bibliography

Banks, James A. (1990). *Teaching Strategies for the Social Studies*. New York: Longman

_____ (1993). "Multicultural Education: Historical Development, Dimensions and Practice". *Review of Research in Education*

Blum, Lawrence A. (2001). "Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar Ras: Tiga Nilai yang bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural", dalam Larry May dan Shari Colins-Chobanian, *Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultural*. Alih Bahasa: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro. Yogyakarta: Tiara Wacana

Burnett, G. (1994). *Varieties of Multicultural Education: an Introduction*. Digest: Eric learning house on Urban Education

Cogan, J. J. (1999). *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*.

Bandung: CISED

Hairus Salim dan Suhadi. 2007. *Membangun Pluralisme dari Bawah*. Yogyakarta: LKIS

Leurs, Koen, Midden, Eva, dan Ponzanesi, Sandra. (2012). "Digital Multiculturalism in the Netherlands: Religious, Ethnic and Gender Positioning by Moroccan-Dutch Youth" *Religion and Gender* vol.2, no. 1 (2012) *published by Routledge*, 150-175

Lindsey, Tim dan Pausacker, Helen. (2016). *Religion, Law and Intolerance in Indonesia*. Abingdon, UK and New York, USA: Routledge

Modood, Tariq. (2007). *Multiculturalism: A Civic Idea*. Cambridge: Polity Press

Nia Aprianingsih. (2014). "Dunia Maya dalam Perbandingan", dalam Nur Janti, dkk. *Online! Geliat Manusia dalam Semesta Maya*. Yogyakarta: Ekspresi Buku

Parekh, Bhikku. (1997). "National Culture and Multiculturalism". dalam Kenneth Thomson (ed.). *Media and Culture Regulation*. London: Sage Publications

_____ (2000). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge, Massachusset: Harvard University Press.

Suharno. (2010). "Politik Rekognisi Dalam Peraturan Daerah Tentang Penyelesaian Konflik Di Dalam Masyarakat Multikultural: Studi Kasus terhadap Perumusan dan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik di Sampit Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah". *Disertasi pada Program Doktor Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada*.

Wawan Tunggal Alam (ed.). (2000). *Bung Karno Menggali Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Yoga Hastyadi Widiartanto. 2016. "2016. Pengguna Internet di Indonesia Capai 132 Juta". <http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta.>, diakses pada tanggal 2 Maret 2017)

LAMPIRAN 2.

VERSI LAIN LUARAN BERUPA ARTIKEL YANG SIAP DITERBITKAN
DALAM JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI

Enhancing Literacy and Encounter through Digital Multiculturalism

Suharno, Samsuri, Halili

*Citizenship Education, Faculty of Social Sciences, Yogyakarta State University,
Email: suharno@uny.ac.id, samsuri@uny.ac.id, halili@uny.ac.id*

Abstract

In the Indonesian context, multiculturalism is one of the basic values forming the nation-state. However, we are recently living at a time when intolerant groups use cyberspace to create ideological tension. This is particularly the case among intercultural identities that differ primarily in terms of religion and/or other sociocultural factors.

This phenomenon should be responded through adequate attention and treatment in Indonesia, which has had so many traumatic tragedies with regard to multicultural conflicts, ethnic conflicts, and the like. For example, from 1952 to 2000 in West Kalimantan, conflict between different ethnicities has occurred at least 12 times. It is necessary to develop digital multiculturalism that can primarily be taught through the main agents of multicultural education in formal education, namely the Citizenship Education teachers. Intervention is required to establish a sort of "counter-propaganda" over the tensions between cultural identities those accidentally triggered by certain groups through cyberspace. The optimization of the teacher's role is very relevant due to their mandate to deliver multicultural education at least in the form of content integration.

Therefore, *Mudig.id* was developed to deal with several multicultural issues. Two main agenda are fostered by the web-based initiative, namely literacy and encounter. The application which is located at mudig.id provides features to enhance the multicultural literacy, i.e. several catchy articles and columns, as well as encounters, e.g. chats, forums, and counselling.

Keywords: *Mudig.id, digital multiculturalism, citizenship education, teacher*

1. Introduction

The multiculturalism or diversity in Indonesia is theoretically an irrevocable fact. Many experts, such as Tim Lindsey and Helen Pausacker [8] acknowledged the objective fact and consider Indonesia as a plural, diverse and multicultural nation.

Multiculturalism is also one of the building fundamental values of the nation-state. It is not only manifested as the conceptual philosophical values but also as the formal political nation-state foundation through the wording "Unity in Diversity" formally stated in the national emblem, Garuda Pancasila.

The peaceful coexistence as wished by the Founding fathers is the requisite of multiculturalism building and maintenance. In the context of describing the Just and Civilized Humanity principle, Sukarno states, "...never mind when people are living in different coexistence; yet, both living side by side. In English, it is called coexistence, peaceful coexistence. It turns out to be, perhaps, not only possible more, but it turns obviously could [14].

However, the preliminary study showed that many intolerant groups have recently used the cyber space to bring ideological tension among the distinguished cultural identities based on the religion and other sociocultural identities in the forms of discourse, propaganda, hate speech, etc.

The phenomenon supposedly receives adequate attention and treatment due to many past traumatic experiences occurred in Indonesia dealing with multicultural and ethnic conflicts and the like. Between 1952 and 2000, for instance, conflict in West Kalimantan between various ethnic groups occurred at least 12 times. These conflicts include: disputes between Madurese and Dayak in 1952, the events of the expulsion of people who are ethnically Chinese by Dayaks in 1967, the riot between Madurese by Dayak ethnics in 1979 in Kalimantan, a dispute between Madurese and Dayak that occurred in 1983, riot between Dayak and Madurese happened in Sanggau Ledo in 1997, the conflict between Madurese and Dayaks in Kalimantan in 1998, the conflict between Malay and Madurese ethnics in Sambas and the riots between Pontianak Malay and Madurese ethnics which occurred on October 25, 2000. In addition, the multicultural conflict also took place in Sampit Kotawaringin Timur (Kotim), Central Kalimantan involving the Madurese and Dayak ethnics. In this conflict, hundreds even thousands of residents were confirmed dead, mostly Madurese. The conflict has also resulted in about 55 323 inhabitants refugee flows that cause abandonment, as evidenced by the death of 357 refugees, epidemics of disease, poor quality of life and inadequate sanitation. Wide impact that occurs in the form of an atmosphere of fear, psychological trauma, and thousands of people who lost possessions [13].

Answering the situation, the digital multicultural development is urgently performed; moreover through the multicultural education agents of the formal education, that is citizenship education teachers. Furthermore, the digital world development allows the discourse exchange go fast and not avoided. Intervention is required to establish a sort of "counter-propaganda" over the tensions between cultural identities that accidentally triggered by certain groups through cyberspace. The optimization of the teacher's role is very relevant due to their mandate to deliver multicultural education at least in the form of content integration introduced by James Banks [1]. In addition, their capacity of civic knowledge, civic disposition, and civic skills are generally adequate.

2. Multiculturalism and Online Technology

Multiculturalism, with its diversity and tendency toward its concepts and practices by Parekh [11] is classified into five types. First, isolationist, refers to a society with groups of cultural background individuals who autonomously live and interact with at least one another.

Second, accommodative, that is the plural society who has dominant culture, making certain adjustment and accommodation for the minority cultural needs. Third, autonomist, a plural society of which the main cultural groups are trying to actualize the equality with the dominant culture and accommodating the autonomous life of the political framework which is collectively accepted.

Fourth, critical or interactive, a plural society in which the cultural groups do not really concern on the autonomous cultural life, but demand more on building the collective

culture which reflects and strains their distinguished perspectives. Fifth, cosmopolitan, this society tries to remove the cultural boundaries in order to build a society where every individual is no more tied and committed to certain cultures, but freely involved in an intercultural experiment and develop each cultural life.

The terms in use, “multiculturalism” is often interchangeable with pluralism. Reviewing multiculturalism more clearly, it is necessary to look the mapping proposed Bhikku Parekh about the multicultural society [11]. First, a society which holds the common cultures, but in some cases, it has a belief and its practice which are different regarding the distinguished life zone and life style. Its people do not wish for building the alternative culture, but differ the cultures with their distinguished existence. Parekh calls this group as the subculture diversity.

Second, a group of society with the critical circles concerning various values and main principles of the dominant cultures, to reform and reconstruct the cultures. Parekh calls this as the perspectival diversity.

Third, a group of society which has different self-awareness, well-organized, and they have to live with the system of beliefs and practices of different beliefs. This phenomenon is called the communal diversity.

So, multicultural society is a society whose components represent one, two, or three of the classifications simultaneously. Different from pluralism that the scope covers the bigger sub-components, such as religion, ethnicity, and race. Multiculturalism involves the more “micro” components, like thinking and life styles.

As the connecting line of the above explanation, multiculturalism is a concept of cultural diversity society controlling, of the slightest level and cultural diversity scope, by giving a recognition for the diversity component existence. The recognition in contemporary phenomena is a demand. That’s why, no recognition, which means no demand, potentially brings up the conflicts.

Multiculturalism control is complex which cannot be handled by a single individual, such as the state government only. The complexity is increasing as the information and communication technology (ICT) is growing, in particular the internet which presents the virtual reality, an essential reality without physical existence. In the virtual reality, everyone freely makes up their identities under no law regulations, acknowledging her/himself as anyone and anywhere. If one wants to do it, anyone can false his/her identity [10]. The situations bring the tension and conflict between the mono-culturalist or anti-pluralist easily contradistinguish the diversity of each cultural identity which can supposedly be led to have a balanced coexistence.

Of that context, digital multiculturalism is one of the alternatives of overcoming the issue through the main program that is called online discussion boards [7]. The online features can be expanded on the recognition and appreciation for the difference and culture under multiculturalism perspective [9].

3. Citizenship Education as Multicultural Education

The multiculturalism education is an education for people of colours [2]. Under the perspective, the multicultural education is basically how to educate the learners how to live in the midst of multi-coloured society.

In another close perspective, multicultural education is a set of processes performed by schools against the oppressive groups [2]. This conception acknowledges that in the factual social relations do happen the poor functional relations between social classes, economics, and cultural. In that inequality oppression, the repression structure works one over the others.

Diversity on the one hand and practice or repressions potential between the various entities is the social phenomenon which receives adequate academic response through the multicultural education. It is an educative program aims at educating the citizens with diverse identities and backgrounds to co-exist peacefully in diversity (peaceful-coexistence) without self-repressions from the many to the few, and the strong against the weak.

In that context, the development of cyber world technology enables the more progressive and more easily accessed multicultural education, especially for the young generations Y to Z as the daily users of the information from the virtual reality. Thus, the character formation, mentality, mindset, and the perspectives of the young generations will be highly influenced, for instance, by the spread of information and virtual activities. It requires an immediate report that the access and influence of the virtual reality does not always bring the positive connotation all the way.

For the Indonesian scope, one of the breakthroughs to optimize in anticipating the negative impacts of the virtual reality which can distort the multiculturalism meaning, break and destroy the Unity in Diversity is fostering the multicultural education, including the use of cyberspace. James Banks brought a perspective that some dimensions are interrelated [1]. They are: first, content integration. This dimensions ideally puts forward the multicultural education as integrating space for the cultures and groups to illustrate the basic concept, generalizations, and theoretical subjects/ disciplines.

Second, the knowledge construction process. The multicultural education dimension leads students to understand the cultural implications into a subject. Third, an equity pedagogy. This dimension requires the teaching method adjustment of the various individual learners' backgrounds, both in terms of race, culture or social. Fourth, prejudice reduction. Multicultural education has a dimension to reduce bias or prejudice concerning a cultural identity.

This multicultural education can be integrated into citizenship education or in a broader perspective since it is basically the multicultural education itself. As stated by Cogan, citizenship education is actually a means of education designed to guide and develop smarter citizen in all subsystems of formal, non-formal, and informal education [5]. The good and smart citizen is constructed by the citizenship education, involving the education coverage in a school or other formal education institutions, family, and neighbourhood. Connecting to the objective framework of the diverse society, citizenship education aims at building the citizenship and civilized citizen in a multicultural society.

Citizenship education as a multicultural education is potentially strategic in implementing three main educational elements as introduced by Blum [3]. First, asserting one's cultural identity, learning and assessing the cultural heritage as well. This element reflects that the individual's cultural internalization is the most fundamental part in cultural relations. A person is believed to be difficult to put appreciation on the cultural diversity if he has not got himself the deepest substance of his own culture. This is the first part to actualize in a multicultural education process.

Second, respect and desire to understand and learn the ethnicity or other cultures. Having someone internalize the cultural values, he is required to understand, appreciate, and build his desire to learn new cultures apart from his own. This element is an advanced stage of the previous element in the multicultural education.

Third, assessing and feeling delighted with the diversity within the culture; that is looking at the presence of groups of different cultures in the society which is seen as something positive to put respect on and be maintained. This element is the outermost and highest element of a multicultural education process, in which every learner is intended to

make others' cultures as inseparable parts of his cultural existence. The diversity in the culture is the holistic building of human life as the social creatures.

Thus, associating the citizenship education with multicultural education is not only conceptually relevant but it is performed as getting the urgency if it is associated with the actual phenomena of the diversity challenge and pluralism in the middle of the rapid internet technology development.

Based on the experiences of Indonesia, multicultural education in schools is developed not in the form of a stand-alone subject, but an integrated Civics subject in the primary and secondary education instead. In the latest curriculum which is currently implemented in Indonesia, particularly in schools, the scope of citizenship education covers four main materials, namely Pancasila as the nation-state principles, Constitution of Republic Indonesia as its constitution, and Diversity in Unity as its motto.

From the scope, the citizenship education obviously provides a flexible scope for the integration of multiculturalism education. The digital multiculturalism development can be conducted through integrative approach in the citizenship education.

The multiculturalism digital development is also performed through the informal activities in the form of unbound learning practice outside the class, not integrated into the citizenship education. This initiative is a necessity due to the extremely high internet access by the Indonesians. Data released by *Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia* (APJII) (Association of Indonesian Internet Networking Operators) in 2016 show the high internet users in Indonesia. According to a survey conducted by APJII, more than a half of the Indonesian citizens are now connected to internet. The survey conducted during 2016 reveals that 132.7 millions of Indonesians have been connected to the internet. While the total number of Indonesian citizens is 256.2 millions [15]. The context provides a very broad scope for the more systematic digital multiculturalism development, especially the one developed through the citizenship education in a broad context and not only in the classes and schools, but also in the middle of the society.

4. The role of Teachers in Developing Digital Multiculturalism

Given that Indonesian education system does not have either curricular and non-curricular formal programs or digital program for the multicultural education; the digital multiculturalism relies on the citizenships education teachers' initiatives. Based on the researcher's observation, some initial digital multiculturalism initiatives are as follows.

First, the e-learning development of citizenship education. Some e-learning services provide, such as moodle, have been well equipped by the teachers to develop the digital multiculturalism, at least as part of the lessons taught.

In the e-learning, the teachers provide opportunities for the students to conduct discussion about the diversity and pluralism that is objectively natural reality and political consensus of the founding fathers. The internet community users often called netizen (acronym of internet citizen) can discuss their individual identity through discourses which develop around them.

In the Indonesian context where media literacy and digital literacy are not good, this form is categorized complex for it requires the good competition and digital literacy from the teachers except if they are guided by the e-learning technical operators. There are not many teachers, especially the senior teachers, who can develop this e-learning basis, besides it also requires the students' ability to perform the features and the very detailed and complex services.

Second, the website and personal blog. There have been many citizenship education teachers initiate to develop a simple website and personal blog from free service providers

to invite netizen, especially the youths who concern on the citizenship issues to bring them into an actual discussion of a public discourse.

Both for the teachers as the owners and administrators, and for the netizen, this form digital multiculturalism which is currently developed provides an easy access and invites more participation than before. As a blog or website administrator with the web blog engine, such as wordpress and blogspot, teachers can control and lead the information, discuss, share, and make a digital dialogue with the netizen regarding the diversity phenomenon with its all cyberspace problems and challenges. For the access users, it will provide them an ease to move and interact with the administrators and other netizen.

Third, in the form of social media. The use of social media is the simplest but the most reachable in developing the digital multiculturalism. The greatest strength in the use of social media as a means of digital multiculturalism is performed by its two sides, access and audience. In terms of access for both the administrators and the users, the use of social media is very easy given that the media can be accessed through multi platforms from desktop, laptop, tablet, and smartphone. While, in terms of audience, the digital multiculturalism selection of this channel absolutely reaches wide-range audience; moreover most netizen in Indonesia have social media accounts, seven one accounts for a user, particularly among young netizen.

Therefore, the citizenship teachers can intensively use their social media accounts to bring the actual cultural and its diversity issues into a discussion to make them accustomed to discuss their own cultural identities associated with the different ones from theirs and around. Thus, the young netizen has cultural awareness of their own, acknowledge and recognize their distinguished identities one another, and eventually they will have the consciousness and desire to respect what is different from themselves and theirs.

5. Online Initiative for Multiculturalism

The online initiative developed to deal with the cultural issues and problems by optimizing the role of teachers, particularly who are teaching Pancasila and Civic Education, is a web-based application. The address of the web is mudig.id.

The initiative development is designed for a futuristic vision, namely “Before the century of Indonesian independence, Indonesian society was realized which fully had social resilience in managing diversity”. With this social security, Indonesian people will practice and promote tolerance for differences, prevent and avoid the use of violence, promote and promote dialogue in preventing destructive conflict, and make differences in identity as part of the richness of civilization and social welfare.

Meanwhile the missions stated to actualize the vision are as follows.

1. To celebrate the diversity
2. To provide the literacy facilities to increase mutual understanding between identities
3. To provide the spaces for dialogue and meeting between identities

For implementing the missions, mudig.id provide three main features to enhance literacy and encounter among identities, namely:

1. **Kebinekaan Kita (Our Diversity):** MuDig provides articles that will add insight into the diversity. They are intended to enhance the literacy on what the multiculturalism is and how we preserve diversity by strengthening multiculturalism.
2. **Berbagi dan Berjumpa (Share and Meet).** MuDig provides Chat and Discussion Forum features for sharing and meeting among others. Chat features can only be done by registered members, Discussion Forum Features are guided by the counsellors and Admins, and can be followed by Members and non-Members.

3. Konsultasi Kebinekaan or Diversity consultation. The feature is provided for handling daily issues of multiculturalism encountered by students or youths. If they face problems related to diversity, for example, if they get bad treatment because of their ethnic, racial, religious or intergroup background, they could consult with Mudid.id's counsellors. This feature only applies for the MuDig members. Mudig.id has already provided 12 counsellors spreading from Sumatera to Papua.

6. Conclusions

From the above discussion, the conclusions are drawn as follows. First, digital multiculturalism is one of the breakthrough alternatives addressing the issues in its major programs, such as provision of the online discussion with focus on respect on the differences not only the cultures under multiculturalism perspective.

Second, of the Indonesian experience, multiculturalism education at schools are developed not in the form of disintegrated lesson, but integrated instead, that is in Civics of the primary and secondary education levels. In addition, the digital multiculturalism is also developed through the informal activities in the form of its own teaching practice which is separated from the citizenship education subject.

Third, given the Indonesian education system which does not have either curricular or non-curricular formal programs, moreover non digital form of the multicultural education, the multicultural development relies on the citizenship education teachers' initiatives. Some initial digital multiculturalism initiatives performed by the teachers recently are in the forms of: a) e-learning development of citizenship education, b) website and personal blog, and c) social media.

Forth, to bridge between problem resolution and teacher's role optimization, Mudig.id was developed to deal with several multicultural issues. Two main agenda are fostered by the web-based initiative, namely literacy and encounter. The application which is located at mudig.id provides features to enhance the multicultural literacy, i.e. several catchy articles and columns, as well as encounters, e.g. chats, forums, and counselling

Bibliography

- [1] Banks James A, Teaching Strategies for the Social Studies, New York, Longman, 1990.
- [2] _____, Multicultural Education: Historical Development, Dimensions and Practice, Review of Research in Education, 1993.
- [3] Blum, Lawrence A, Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar Ras: Tiga Nilai yang bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural, in Larry May and Shari Colins-Chobanian, Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultural, translated by Sinta Carolina and Dadang Rusbiantoro, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2001.
- [4] Burnett G, Varieties of Multicultural Education: an Introduction, Digest, Eric learning house on Urban Education, 1994.
- [5] Cogan J. J, Developing the Civic Society: The Role of Civic Education, Bandung, CISED, 1999.
- [6] Hairus Salim and Suhadi, Membangun Pluralisme dari Bawah, Yogyakarta, LKIS, 2007.
- [7] Leurs, Koen, Midden, Eva, and Ponzanesi, Sandra. 2012. Digital Multiculturalism in the Netherlands: Religious, Ethnic and Gender

Positioning by Moroccan-Dutch Youth. *Religion and Gender Vol.2, No. 1, 2012*. published by Routledge, 150-175

- [8] Lindsey, Tim and Pausacker, Helen, *Religion, Law and Intolerance in Indonesia*. Abingdon, UK and New York, USA, Routledge, 2016.
- [9] Modood, Tariq. *Multiculturalism: A Civic Idea*, Cambridge, Polity Press, 2007.
- [10] Nia Aprianingsih. *Dunia Maya dalam Perbandingan*, in Nur Janti, et al. *Online! Geliat Manusia dalam Semesta Maya*, Yogyakarta, Ekspresi Buku, 2014.
- [11] Tansley Parekh, Bhikku, *National Culture and Multiculturalism*, in Kenneth Thomson (ed.). *Media and Culture Regulation*, London, Sage Publications, 1997.
- [12] _____, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, Cambridge, Massachusset, Harvard University Press, 2000.
- [13] Suharno, *Politik Rekognisi Dalam Peraturan Daerah Tentang Penyelesaian Konflik Di Dalam Masyarakat Multikultural: Studi Kasus terhadap Perumusan dan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik di Sampit Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah*, *Disertasi pada Program Doktor Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada*, 2010.
- [14] Wawan Tunggal Alam (ed.), *Bung Karno Menggali Pancasila*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- [15] Yoga Hastyadi Widiartanto, “2016 Pengguna Internet di Indonesia Capai 132 Juta”.
<http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.interne.t.di.indonesia.capai.132.juta.>, retrieved on March, 2 2017), 2016.